

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM
MENGATASI KEMISKINAN DI KELURAHAN BATU BERSURAT
KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



SUKMA AULIYAH
NPM : 177310372

**JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU**

2021

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb..

Dengan ini mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat yang diberikan-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar yang berjudul: “Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar”. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bisa bermanfaat bagi diri penulis, keluarga serta masyarakat

Dalam menyelesaikan Skripsi ini penulis telah banyak di berikan bantuan baik berupa waktu, saran dan kerjasama, serta diskusi dari pihak-pihak yang kompeten dan berdedikasi demi kesempurnaan penulisan sebuah karya ilmiah yang dimuat dalam sebuah Skripsi. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang berpartisipasi kepada penulis terutama :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., MCL selaku Rektor Universitas Islam Riau; yang menyediakan fasilitas dan memberi kesempatan pada penulis ilmu pada lembaga pendidikan yang beliau pimpin.
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Islam Riau.

3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan dan seluruh dosen yang mengajar Program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Andriyus, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau.
5. Bapak Dr. Ahmad Fitra Yuza, S.IP., M.A selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak menyediakan waktu dan menyalurkan pengetahuan kepada penulis terutama proses bimbingan berlangsung.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen selaku Staf Pengajar khususnya Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang dimiliki kepada penulis.
7. Kepada Tata Usaha beserta Staf di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang senantiasa memberikan bantuan terutama bantuan administratif kepada penulis sehingga dapat melaksanakan perkuliahan dengan baik.
8. Terkhususnya dan istimewa penulis persembahkan karya ini kepada kedua orang tua yakni Ayahanda tercinta Khairuz Zaman dan Ibunda tercinta Asmaliyurni yang selalu memberikan dukungan kepada penulis baik dari segi moril, materil maupun doa-doanya sehingga penulis dapat menyelesaikan usulan penelitian ini.
9. Kepada kakanda tersayang M.Rizky Yurman serta keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat, doa serta motivasi kepada penulis agar tetap semangat dalam melakukan penulisan.

10. Kepada Sahabat dan teman-teman seperjuangan angkatan 2017 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang senantiasa memberikan semangat, motivasi yang luar biasa.

Penulis menyadari bahwa pada lembar tertentu naskah Skripsi ini mungkin ditemukan berbagai kesalahan dan kekurangan. Untuk memenuhi hal ini penulis berharap kemakluman dari para pembaca. Penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberikan dorongan sehingga penulis ini dapat terselesaikan. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada pembaca.

Aamiin Yarabbalamin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, September 2021

Sukma Auliyah

DAFTAR ISI

Halaman

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
SURAT PERNYATAAN	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat penelitian.....	16
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	18
1. Pemerintahan.....	18
2. Kebijakan Publik.....	19
3. Pemberdayaan Masyarakat.....	22
4. Program Keluarga Harapan.....	24
5. Kemiskinan	30
6. Efektivitas	32
7. Efektivitas Program.....	33
B. Penelitian Terdahulu	37
C. Kerangka Pikir	39
D. Konsep Operasional	40
E. Operasionalisasi Variabel.....	41
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Tipe Penelitian	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	43
D. Teknik Penentuan Informan.....	44
E. Jenis dan Sumber Data	44
F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
G. Teknik Analisa Data.....	46
H. Jadwal Kegiatan Penelitian	50
I. Rencana Sistematika	51

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Kelurahan Batu Bersurat	52
B. Gambaran Umum Program Keluarga Harapan	67
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Identitas Responden	72
B. Tanggapan Responden	76
C. Faktor yang mempengaruhi	106
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	108
B. Saran.....	109
DAFTAR KEPUSTAKAAN	111
DOKUMENTASI	
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel

I.1	Jumlah Besar Bantuan Program Keluarga Harapan pertahun .	7
I.2	Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH per Kecamatan di Kabupaten Kampar.....	12
I.3	Data Keluarga Penerima Manfaat PKH dari tahun 2015-2020...	13
I.4	Data Masyarakat Miskin yang Terdaftar dan Tidak Terdaftar dalam Program Keluarga Harapan berdasarkan Indikator Sasaran Penerima Manfaat PKH.....	13
II.1	Kajian Penelitian Terdahulu.....	37
II.2	Konsep Operasional Variabel.....	41
III.1	Informan Penelitian.....	44
III.2	Jadwal Kegiatan Penelitian.....	50
IV.1	Jumlah Penduduk Kelurahan Batu Bersurat.....	54
IV.2	Jumlah Rumah Ibadah.....	55
IV.3	Jumlah Sekolah.....	56
IV.4	Mata Pencaharian Penduduk.....	56
IV.5	Jumlah Penerima Manfaat PKH 2020.....	68
V.1	Identitas Informan.....	72
V.2	Identitas Usia.....	74
V.3	Identitas Jenis Kelamin.....	74
V.4	Identitas Tingkat Pendidikan.....	75

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar	
I.1 Alur Pelaksanaan PKH	9
II.1 Kerangka Pikir	39
IV.1 SOP Kelurahan.....	66



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta seminar Usulan Penelitian yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sukma Auliyah
NPM : 177310372
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S-1)
Judul Usulan Penelitian : Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar

Atas naskah yang didaftarkan pada seminar usulan penelitian ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah Usulan Penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Januari 2021

Sukma Auliyah
NPM: 177310372

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PROGRAM KELUARGA HARAPAN DALAM MENGATASI KEMISKINAN DI KELURAHAN BATU BERSURAT KECAMATAN XIII KOTO KAMPAR

OLEH

SUKMA AULIYAH

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi dan bagaimana Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan tipe pendekatan deskriptif yaitu menggambarkan keadaan yang sebagaimana adanya dan menjelaskan variabel yang diteliti, yang berjumlah 6 orang yang terdiri dari key informan dan informan, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar dengan menggunakan indikator Pemahaman Program, Tepat Sasaran, Tepat Waktu, Tercapainya Tujuan dan Perubahan Nyata menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan belum efektif dalam mengatasi kemiskinan. Hambatan dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) adalah penerima bantuan yang tidak menyeluruh, ketidaktaahuan masyarakat, kurang efektifnya media komunikasi, serta sedikitnya jumlah pendamping. Masukan dan saran peneliti terhadap penelitian ini yaitu agar pihak dinas sosial lebih teliti dalam menetapkan sasaran penerima Program Keluarga Harapan serta menambah jumlah pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Kata kunci : Efektivitas, Program Keluarga Harapan, Kemsikinan

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF THE HOPE FAMILY PROGRAM IN OVERCOMING POVERTY IN BATU BERSURAT VILLAGE XIII KOTO KAMPAR DISTRICT

BY

SUKMA AULIYAH

The family Hope Program (PKH) is the provision of conditional social assistance to poor and vulnerable families and or someone who is registered in integrated data handling of the poor, processed by social welfare data and information center and designated as PKH beneficiary families. The purpose of this study was to determine the factors that influence and how the Effectiveness of the Family Hope Program in Overcoming Poverty in Batu Bersurat Village, XIII Koto Kampar Distric. The research uses a qualitative method with a descriptive type of approach, which describes the situation as it is and explains th variables studied, which amounted to 6 people consisting of key informan and informants, based on the research that has been done, the result show that the Effectiveness of the Family Hope Program in Overcoming Poverty in Btu Bersurat Village The letter from District XIII Koto Kampar using the indicators of Program Understanding, Right on Target, Right on Time, Achieving Goals and Real Changes show that the Family Hope Program has not been effective in overcoming poverty. Barries to the implementation of the Family Hope Program (PKH) are incomplete assistance recipients, public ignorance, ineffective communication media, and the small number of companions. The research's input and suggestions for this research are for the social service to be more thorough in determining the target recipients of the Family Hope Program and increasing the number of companions for the Family Hope Program (PKH) so that implementation of activities can run well.

Keyword : Effectiveness, Family Hope Program, Poverty

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan yang sering di hadapi oleh negara adalah kemiskinan, kemiskinan sendiri merupakan masalah yang sifatnya multidimensional yang berkaitan dengan aspek sosial, ekonomi, budaya, dan aspek lainnya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang menjadi tanggung jawab Negara, sebagaimana yang telah di sebutkan didalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ”. Dari pernyataan ini dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan hal yang sangat harus diperhatikan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat itu sendiri dan juga pembangunan nasional, uu yang dibuat untuk mengatasi kemiskinan sangatlah banyak diantaranya yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional,
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Kesejahteraan Sosial, dan
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin(Rafiudin, 2016).

Undang-Undang yang dibuat pemerintah sangatlah baik namun yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang di amanatkan Undang Undang. Pada kenyataannya masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang masih mengalami permasalahan kemiskinan. Rendahnya kualitas hidup penduduk miskin mengakibatkan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Seperti yang bisa dilihat saat ini masih banyaknya anak-anak usia sekolah yang tidak bersekolah dikarenakan kurangnya biaya dan juga rendahnya tingkat kemampuan pemerintah dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang menyebabkan banyaknya pengangguran. Dan tentu masalah ini menyebabkan tingginya angka kemiskinan di Indonesia.

Upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia diantaranya adalah Jaring Pengaman Sosial (JPS), Subsidi Langsung Tunai (SLT), Beras Miskin (Raskin), Asuransi Kesehatan untuk Masyarakat Miskin (Askeskin), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM), serta program yang terakhir diluncurkan adalah Program Keluarga Harapan (PKH) (Ekardo, Firdaus, 2014).

Pada pasal 9 Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan terdiri dari urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum.

- Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat

- Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota, urusan pemerintahan yang diserahkan ke daerah menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah.
- Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan dari presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan pasal 9 ayat (2) urusan pemerintahan absolut terdiri atas :

- politik luar negeri
- pertahanan
- keamanan
- yustisi
- moneter dan fiskal nasional
- f. agama

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan, urusan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berikut urusan pemerintahan tersebut :

- (1) Urusan Pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (2) meliputi :
 - Pendidikan**
 - Kesehatan
 - Pekerjaan umum dan penataan ruang

- d. Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
- f. Sosial

(2) Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :

- a. Tenaga kerja
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
- c. Pangan
- d. Pertanahan
- e. Lingkungan hidup
- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
- g. Pemberdayaan masyarakat desa
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
- i. Perhubungan
- j. Komunikasi dan informatika
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah
- l. Penanaman modal
- m. Kepemudaan dan olahraga
- n. Statistik
- o. Persandian
- p. Perpustakaan
- q. Kearsipan

Dalam rangka melaksanakan tugas dan urusan wajib diatas maka pemerintah menetapkan berbagai Dinas atau Badan untuk melaksanakan urusan-urusan tersebut, salah satunya adalah Dinas Sosial.

Salah satu program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial untuk menanggulangi masalah kemiskinan yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan salah satunya adalah Program Keluarga Harapan (PKH), PKH adalah pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga dan/ atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, di olah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. Program ini mulai dilaksanakan di Indonesia pada tahun 2007 dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos), dengan pengawasan ketat Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Program Keluarga Harapan (PKH) dilaksanakan secara berkelanjutan yang dimulai pada tahun 2007 di tujuh provinsi. Sampai tahun 2013, Program PKH sudah dilaksanakan di seluruh provinsi di Indonesia dan mencakup 336 kabupaten/kota dan 3.429 kecamatan dengan target peserta PKH sampai 2013 mencapai 2,4 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Program ini di buat untuk membantu masyarakat dibidang pendidikan dan kesehatan, dan dana yang dikeluarkan hanya diperuntukkan untuk RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin).

Adapun persyaratan untuk menjadi keluarga penerima manfaat (KPM) program keluarga harapan (PKH) adalah Keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah

oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH dengan kriteria :

1. Keluarga miskin yang memiliki komponen kesehatan (ibu hamil, nifas, balita, anak prasekolah)
2. Keluarga miskin yang memiliki komponen anak pendidikan (SD sederajat, SMP sederajat, SMA sederajat) atau
3. Keluarga miskin yang memiliki anak 7 - 21 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun,
4. penyandang disabilitas berat, dan
5. lanjut usia di atas 60 tahun (Rahmawati & Kisworo, 2017).

Keluarga yang menerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) memiliki kewajiban untuk memenuhi persyaratan kesehatan, persyaratannya seperti ibu hamil yang harus memeriksakan kehamilannya, menimbang berat badan dan memberikan vitamin kepada balita. Kemudian peserta Program Keluarga Harapan (PKH) juga diwajibkan memenuhi persyaratan pendidikan jika memiliki anak dengan rentang usia 7-15 tahun, Anak peserta PKH tersebut harus didaftarkan pada satuan pendidikan setara SD dan SMP dan mengikuti kehadiran di kelas minimal 85 persen dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung (Sulistiyani, 2004).

Program ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dengan memberikan akses dibidang pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan diberikannya akses ini diharapkan kesejahteraan dapat tercapai.

Adapun besaran bantuan yang di berikan kepada penerima bantuan Program Keluarga Harapan adalah sebagai berikut:

Tabel I.1 : Jumlah besaran bantuan program keluarga harapan per tahun

No.	A. Bantuan Tetap Untuk Setiap Keluarga	Jumlah
1.	Reguler	Rp. 550.000,- keluarga/tahun
2.	PKH AKSES	Rp.1.000.000,- keluarga/tahun

No.	B. Bantuan Komponen Setiap Jiwa Dalam Keluarga	Jumlah
1.	Ibu Hamil	Rp. 2.400.000,-
2.	Anak Usia Dini	Rp. 2.400.000,-
3.	SD Sederajat	Rp.900.000,-
4.	SMP Sderajat	Rp.1.500.000,-
5.	SMA Sederajat	Rp.2.000.000,-
6.	Disabilitas berat	Rp.2.400.000,-
7.	Lanjut Usia Umur 60 tahun	Rp.2.400.000,-

Sumber : Kemensos 2019

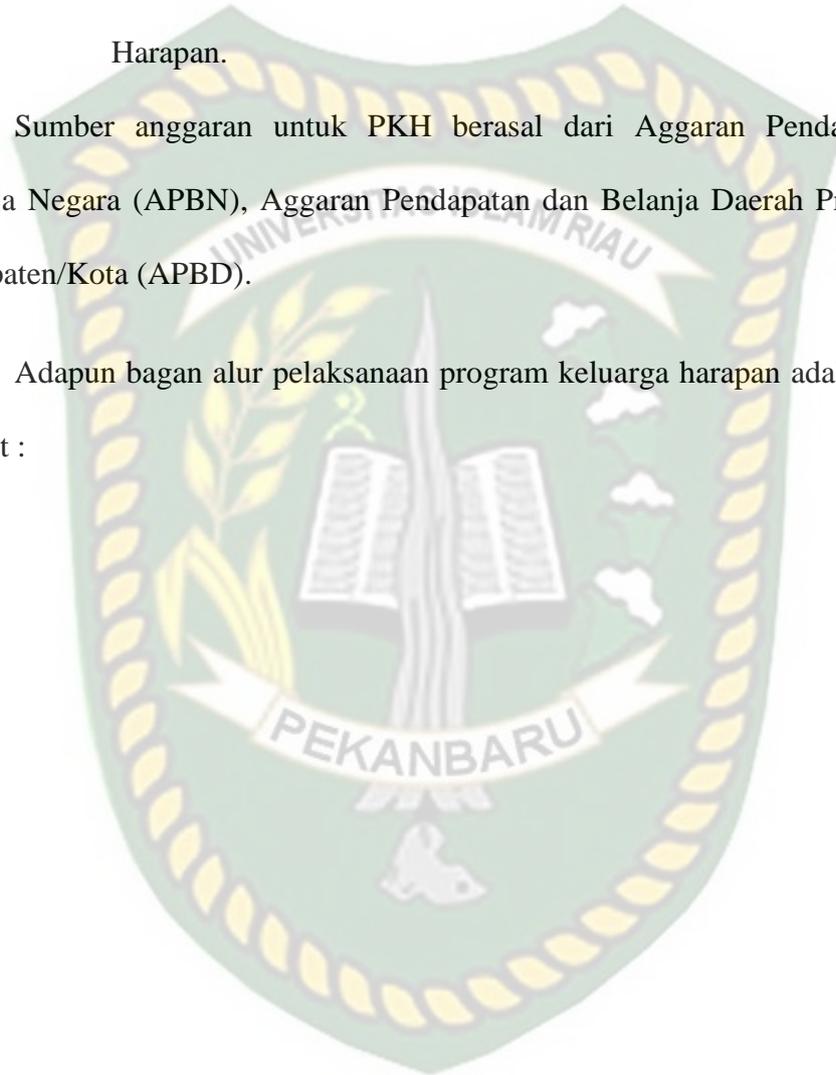
Kemudian dasar hukum dari program PKH ini adalah:

1. Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

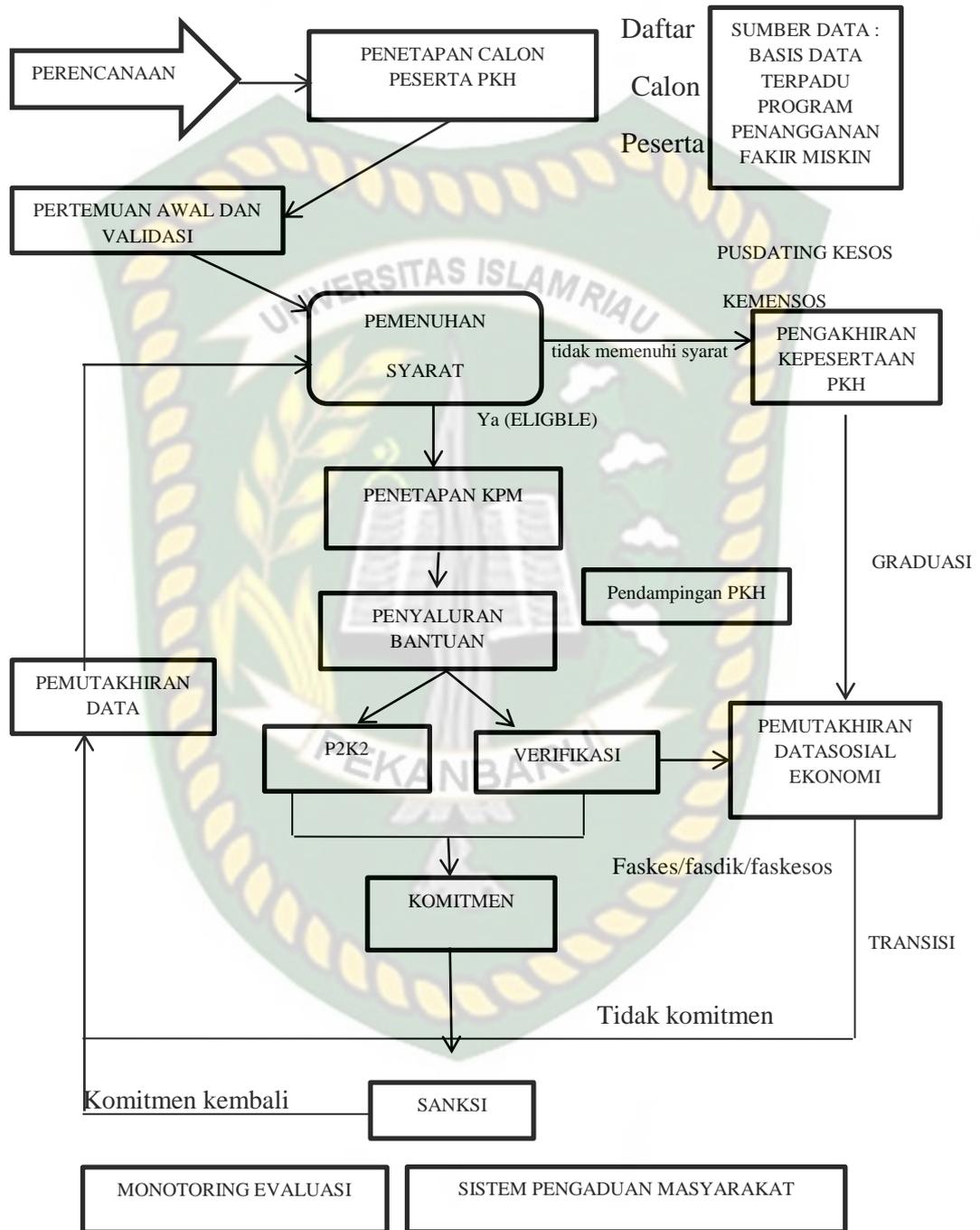
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
4. Permensos Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.

Sumber anggaran untuk PKH berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (APBD).

Adapun bagan alur pelaksanaan program keluarga harapan adalah sebagai berikut :



Gambar I. 1 : Alur pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH)



Sumber : Kemensos 2019

Dari gambar diatas dapat di pahami bahwa alur pelaksanaan PKH terdiri dari :

1. Perencanaan
2. Penetapan Calon Peserta PKH
3. Persiapan Daerah
4. Pertemuan Awal dan Validasi
5. Penetapan Keluarga Penerima Manfaat PKH
6. Penyaluran Bantuan
7. Pendampingan
8. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)
9. Verifikasi Komitmen
10. Pemutakhiran Data
11. Transformasi Kepesertaan PKH
12. Sistem Pengaduan Masyarakat
13. e-PKH

Kemudian pencairan dana Program Keluarga Harapan disalurkan kepada KPM secara bertahap yaitu empat kali dalam setahun yaitu pada bulan januari, april, juli dan oktober, namun mengingat bahwa pada tahun 2020 terjadi Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) penyaluran bantuan menjadi setiap bulan secara non tunai ke rekening keluarga penerima manfaat PKH, dan penarikan dana bantuan sosial PKH yang di transfer ke rekening keluarga penerima manfaat dilakukan di e-waroeng/agen bank, ATM, dan Teller bank berdasarkan pasal 7 Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/3/BS.01.02/4/2020 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

Program keluarga harapan (PKH) di Provinsi Riau dimulai pada tahun 2011. Yang tersebar ke 12 Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Pada tahun 2011 program keluarga harapan dilaksanakan di Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kampar
- b. Tahun 2012 dilaksanakan di Kabupaten Kuantan Singingi
- c. Tahun 2013 dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Kota Dumai
- d. Tahun 2014 dilaksanakan di Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rohil, Kabupaten Rohul, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menurut Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa jumlah penduduk di provinsi Riau berjumlah 1,31 juta jiwa, sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan) di Provinsi Riau pada tahun 2020 sebesar 483,39 ribu jiwa. Pada tahun 2020 provinsi Riau telah mendapat bantuan program keluarga harapan berjumlah 158.697 KPM.

Kemudian jumlah penduduk di Kabupaten Kampar pada periode tahun 2020 berjumlah 890.200 ribu jiwa, dari 890.200 jiwa penduduk di Kabupaten Kampar terdapat 66.81 ribu jumlah penduduk miskin. Kabupaten Kampar merupakan salah satu kabupaten penerima Program Keluarga Harapan(PKH) di Provinsi Riau, Jumlah penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) di kabupaten kampar per kecamatan adalah 25.798 KPM, berikut data per kecamatan di kabupaten kampar :

Tabel I.2 : Data Jumlah Keluarga Penerima Manfaat PKH per Kecamatan di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Jumlah
1.	Bangkinang	1522
2.	Bangkinang Kota	414
3.	Gunung Sahilan	731
4.	XIII Koto Kampar	1577
5.	Kampa	779
6.	Kampar	2086
7.	Kampar Kiri	1559
8.	Kampar Kiri Hilir	535
9.	Kampar Kiri Hulu	1261
10.	Kampar Kiri Tengah	1111
11.	Kampar Utara	733
12.	Koto Kampar Hulu	1030
13.	Kuok	1063
14.	Perhentian Raja	637
15.	Rumbio Jaya	854
16.	Salo	1052
17.	Siak Hulu	1475
18.	Tambang	1804
19.	Tapung	2682
20.	Tapung Hilir	1183
21.	Tapung Hulu	1710

Sumber : UPPKH Kabupaten Kampar

Kelurahan Batu Bersurat merupakan salah satu kelurahan penerima bantuan PKH. Kelurahan yang terletak di Kabupaten Kampar ini merupakan Ibukota dari Kecamatan XIII Koto Kampar, Penduduk kelurahan batu bersurat berdasarkan tahun 2020 berjumlah 2699 jiwa, kemudian jumlah kepala keluarga berjumlah 750 KK (Kepala Keluarga), sedangkan kepala keluarga miskin berjumlah 402 KK(Kepala Keluarga).

Adapun jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) di Kelurahan Batu Bersurat berdasarkan data yang peneliti dapatkan dari

pendamping PKH kecamatan XIII Koto Kampar dari tahun 2015-2020 adalah sebagai berikut :

Tabel I.3 : keluarga penerima manfaat PKH dari tahun 2015-2020

Tahun	Jumlah
2015-2017	95 KPM
2018	101 KPM
2019	172 KPM
2020	155 KPM

Sumber : pendamping PKH

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) PKH tidak mengalami kenaikan dan hanya berjumlah 95 KPM, kemudian pada tahun 2019 terjadi kenaikan jumlah keluarga penerima manfaat menjadi 101 KPM, selanjutnya pada tahun 2019 jumlah KPM bertambah menjadi 172 KPM, namun pada tahun 2020 jumlah KPM kembali turun mejadi 155 KPM. Berikut adalah data masyarakat miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar dalam program keluarga harapan berdasarkan komponen sasaran penerima program keluarga harapan.

Tabel I.4 : Data masyarakat miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar dalam program keluarga harapan berdasarkan indikator sasaran penerima program keluarga harapan tahun 2020

No	Indikator	Jumlah masyarakat miskin	Jumlah masyarakat yang termasuk ke dalam program keluarga harapan
1.	Kesehatan a. ibu hamil	10	6

	b. balita / anak prasekolah	96	48
2.	Pendidikan		
	a. SD	102	73
	b. SMP	158	115
	c. SMA	98	73
3.	Disabilitas	2	0
4.	Lanjut Usia	10	0

Sumber : Pendamping PKH dan Kantor Lurah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 masih ada masyarakat miskin yang belum terdaftar kedalam program keluarga harapan namun sudah memenuhi indikator sasaran penerima manfaat PKH. Di kelurahan Batu Bersurat saat ini masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan PKH dan juga belum terdata oleh BPS. Dari wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu penerima manfaat PKH, peneliti menemukan bahwa masih ada masyarakat yang dikategorikan mampu yang menerima bantuan tersebut dan juga didalam pencairan dana PKH ini juga sering tidak tepat waktu yang mana seharusnya dana PKH di salurkan kepada KPM pada bulan januari, april, juli dan oktober namun pada fakta di lapangan dana PKH terkadang terlambat sampai satu bulan dan juga peserta PKH tidak mendapat pemberitahuan kapan jadwal pencairan dana PKH tersebut, yang mana pendamping hanya memberikan informasi melalui ketua kelompok PKH sehingga informasi tersebut hanya di sampaikan dari mulut ke mulut sehingga tidak efektif untuk kelancaran sebuah program.

Selanjutnya dari wawancara yang peneliti lakukan dengan masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH mereka menyebutkan bahwa tidak

adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat tentang bagaimana cara untuk mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan tersebut.

Dari penjelasan latar belakang diatas peneliti menemukan beberapa fenomena, diantaranya :

1. Terindikasi tidak tepat sasaran dimana jumlah keluarga yang mendapat bantuan PKH hanya 155 KPM sedangkan jumlah masyarakat miskin yaitu terdiri dari 402 KK. Dari hal ini dapat dilihat bahwa masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan PKH.
2. Terindikasi tidak tepat waktu didalam pencairan dana PKH. yang mana menurut kemensos seharusnya pencairan dana PKH disalurkan kepada KPM pada bulan januari, april, juli, dan oktober namun pada fakta di lapangan pencairan dana PKH sering kali tidak tepat waktu dan keterlambatannya bisa sampai dengan satu minggu dari yang telah di tetapkan untuk pencairan dana PKH tersebut.

Karena itu peneliti tertarik dan ingin mengkaji tentang permasalahan yang terjadi didalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan dan juga ingin mengetahui sejauh manakah program ini mengatasi kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena diatas rumusan masalah penelitian yang diajukan peneliti adalah :

1. Bagaimanakah efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar?
2. Apa saja faktor penghambat Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah:

a. Kegunaan Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian dengan masalah yang sama, dan supaya dapat meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan memperdalam pengetahuan mengenai Efektivitas Program Keluarga

Harapan dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat
Kecamatan XIII Koto Kampar.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Pemerintahan

Secara etimologi pemerintah dapat diartikan sebagai berikut yaitu perintah yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Terdiri dari dua unsur, rakyat dan pemerintah, yang keduanya ada hubungan. Setelah ditambah awalan “pe-“ menjadi pemerintah yang berarti badan atau organisasi yang mengurus. Setelah ditambah akhiran “-an” menjadi pemerintahan, yang berarti perbuatan, cara atau perihal.

Pemerintahan dalam arti luas adalah segala bentuk kegiatan atau aktivitas penyelenggara Negara yang dilakukan oleh organ-organ Negara yang mempunyai otoritas atau kewenangan untuk menjalankan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh fungsi eksekutif saja dalam hal ini yang dilakukan oleh presiden, menteri-menteri sampai birokrasi paling bawah.

Menurut C.F. Strong (dalam Syafiie 2013:10) pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan Negara. Oleh karena itu, pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam

penyelenggaraan peraturan,hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Taliziduhu Ndraha (2003:6) menyatakan bahwa pemerintahan adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui lembaga pemerintah, sehingga setiap masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan ketentuan (harapan) yang di perintah.

Lebih lanjut Ndraha menyatakan bahwa pemerintahan merupakan sebuah sistem multi proses yang bertujuan untuk memenuhi dan melindungi berbagai kebutuhan, serta tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan juga proses layanan sipil (dalam Rauf, 2018:16).

Menurut Labolo (2012: 23) pemerintahan merupakan gejala yang lebih umum dibandingkan terminologi pemerintah. Pemerintahan tidak hanya merujuk kepada pemerintah namun juga berkaitan dengan ranah publik seperti kepentingan warga negara, pemilik suara, dan juga pekerja. Peran pemerintah sebatas otoritas semata, maka menurut Robinson (dalam Kuper, 2000: 417) pemerintahan mengacu pada proses pengelolaan politik, gaya atau model pengurusan masalah-masalah umum serta pengelolaan sumber daya umum.

2. Kebijakan Publik

Kebijakan ditulis dalam bahasa inggris dengan policy, sedangkan kebijaksanaan ditulis dalam bahasa inggris dengan wisdom. Perbedaannya adalah kalau kebijakan berasal dari atasan tertinggi, misalnya pemerintah pusat, maka

pada tingkat pimpinan daerah atau yang setingkat berada dibawahnya dapat mengubahnya sesuai dengan situasi dan kondisi dilapangan secara empiris.

Menurut Thomas R. Dye (1989:1) dalam bukunya yang terkenal *Introducing Public Policy* mengatakan bahwa kebijakan Negara adalah apapun yang diambil pemerintah, baik melakukan sesuatu itu atau tidak melakukan sama sekali (dalam Syafiie, 2013:355).

Eystone (1971 : 18) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah hubungan yang berlangsung diantara unit/ satuan pemerintah dengan lingkungannya.

Chief J. O. Udoji (dalam Wahab ,2012:15) mendefenisikan kebijakan publik sebagai suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar masyarakat.

Carl J. Federick mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu di mana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu(Rushananto, 2014).

Muhadjir (2005) mengatakan bahwa kebijakan dapat dibedakan menjadi dua yaitu kebijakan substantif dan kebijakan implementatif. Kebijakan substantif adalah keputusan yang dapat diambil berupa memilih alternatif yang dianggap benar untuk mengatasi masalah. Tindak lanjut dari kebijakan substantif adalah kebijakan implementatif yaitu keputusan-keputusan yang berupa upaya upaya yang harus dilakukan untuk melaksanakan kebijakan substantif.

Kebijakan memiliki dua aspek (Thoha : 2012), yakni:

- a. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat.
- b. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut (Ramdhani, 2016).

Mengenai keberhasilan kebijakan publik, Islamy (2010) menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya.

Kebijakan merupakan hal nyata yang dilakukan pemerintah dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, menghapus kemiskinan, memberantas korupsi, memberantas buta aksara,

menggalakkan program keluarga berencana, dan menggalakkan perumahan rakyat bagi golongan masyarakat berpenghasilan rendah (Labolo, 2012: 21)

3. Pemberdayaan Masyarakat

Pengertian pemberdayaan masyarakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008) adalah proses, cara, membuat, memberdayakan dari kata daya yaitu kemampuan melakukan sesuatu atau kemampuan untuk bertindak.

Pemberdayaan berasal dari kata dasar daya yang mengandung arti “kekuatan”, dan merupakan terjemahan dari istilah dalam bahasa Inggris “empowerment”, sehingga dapat dijabarkan bahwa pemberdayaan mengandung arti memberikan daya atau kekuatan kepada kelompok yang lemah yang belum mempunyai daya/kekuatan untuk hidup mandiri, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok/kebutuhan dasar hidupnya sehari hari seperti makan, pakaian/sandang, rumah/papan, pendidikan, kesehatan. Memberikan kekuatan atau power kepada orang yang kurang mampu atau miskin atau powerless memang merupakan tanggungjawab pemerintah, namun seharusnya mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, terutama masyarakat itu sendiri yang menjadi kelompok sasaran yaitu dengan ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan setiap program/kegiatan pemberdayaan (Hamid, 2018 : 9).

Menurut Gunawan, 2009 : 102 Pemberdayaan masyarakat, dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif, untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (dalam Hamid, 2018 : 10).

Menurut Suharto (2005 : 57) pemberdayaan berasal dari kata “*power*” yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang. Khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas mengemukakan pendapat , melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan.

Soetomo (2011: 22) menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah sebuah pendekatan yang memberikan kesempatan, wewenang yang lebih besar kepada masyarakat terutama masyarakat lokal untuk mengelola proses pembangunannya.

Najiyati dkk (2005 : 51) mengatakan bahwa Pemberdayaan merupakan salah satu pendekatan untuk mengatasi persoalan kemiskinan, ketidakberdayaan, dan kerentanan masyarakat lemah. Pemberdayaan masyarakat juga dapat diartikan sebagai upaya mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan melalui pengalihan pengambilan keputusan kepada masyarakat agar mereka terbiasa dan mampu bertanggung jawab terhadap segala sesuatu yang dipilihnya. Dalam konteks ini, pemberdayaan masyarakat dapat dipersamakan dengan proses pengembangan masyarakat yang bertujuan memampukan masyarakat dalam mendefinisikan dan memenuhi kebutuhan sendiri, serta memutuskan apa yang terbaik bagi dirinya.

Menurut Kartasmita 1996 (dalam Mulyawan 2016 : 51) menyatakan bahwa pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat, yaitu upaya memberdayakan masyarakat yang dimulai dari penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang. Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat, tetapi juga pranata-pranatanya. Dari pengertian di atas yang dikaitkan dengan pemberdayaan dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah tindakan untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian yang dimulai dengan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat menjadi berkembang.

Pemberdayaan menurut Owin (2005:108) merupakan cara untuk mencapai tujuan akhir yang disebut dengan masyarakat sejahtera dan mandiri yang mempunyai kekuatan hidup di atas potensinya sendiri.

4. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan (PKH) adalah sebuah kebijakan program yang dirumuskan oleh Pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan penduduk di Indonesia. Secara umum, konsep kebijakan hampir selalu dikaitkan dengan keputusan tetap yang bersifat konsisten dan merupakan pengulangan tingkah laku dari yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut (Sarman, 2000).

Di dalam peraturan menteri sosial (Permensos) Nomor 1 tahun 2018 tentang pelaksanaan Program Keluarga Harapan, Program Keluarga Harapan

merupakan program yang memberikan bantuan berupa uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin (RSTM) berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan yang harus melakukan kewajibannya. Program ini secara internasional dikenal sebagai program conditional cash transfer (CCT) atau program Bantuan Tunai Bersyarat. Kemensos, khususnya Direktorat Jaminan Sosial Keluarga adalah koordinator dan pelaksana program PKH.

b. Tujuan Program Keluarga Harapan

Menurut permensos nomor 1 tahun 2018 program keluarga harapan bertujuan :

- Untuk meningkatkan taraf hidup Keluarga Penerima Manfaat (KPM) melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
- Mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan
- Menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.
- Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan.
- Mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga Penerima Manfaat

c. Hak dan Kewajiban Penerima Program Keluarga Harapan

1. Hak penerima manfaat PKH

- Bantuan sosial PKH
- Pendampingan PKH

- Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
- Program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energy, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya

2. Kewajiban penerima manfaat PKH

Penerima manfaat program keluarga harapan diwajibkan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Kesehatan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang sudah ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan seperti di bawah ini:

Anak Usia 0-6 Tahun :

- Anak yang usianya 0-28 hari harus diperiksa kesehatannya sebanyak 3 kali.
- Anak usia 0-11 bulan harus diimunisasi lengkap (BCG, DPT, Polio, Campak, Hepatitis B) dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.
- Anak usia 6-11 bulan harus mendapatkan vitamin A minimal sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun, yaitu bulan Februari dan Agustus.
- Anak usia 12-59 bulan perlu mendapatkan imunisasi tambahan dan ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan.

- Anak usia 5-6 tahun ditimbang berat badannya secara rutin setiap bulan untuk dipantau tumbuh kembangnya.

Ibu Hamil dan Ibu Nifas :

- Selama kehamilan, ibu hamil harus melakukan pemeriksaan kesehatan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada usia kehamilan 0-3 bulan, 4-6 bulan, kemudian 7-9 bulan sebanyak dua kali dan mendapatkan suplemen tablet Fe.
- Ibu melahirkan harus ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan.
- Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan dan mendapat pelayanan KB setidaknya 3 kali.

2. Pendidikan

Peserta PKH diwajibkan memenuhi persyaratan pendidikan yakni kehadiran diri minimal 85% sebulan selama satu tahun ajaran berlangsung, dengan beberapa catatan seperti berikut:

- Apabila dalam keluarga terdapat anak yang berusia 5-6 tahun maka harus mengikuti persyaratan pendidikan.
- Anak berusia 7-15 tahun peserta PKH harus didaftarkan/terdaftar pada pendidikan (SD/MI/SDLB/ Paket A atau SMP/MTS/SMLB atau SMP/MTS Terbuka).
- Jika memiliki anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka peserta PKH diwajibkan mendaftarkan anak

tersebut ke satuan pendidikan yang melaksanakan program wajib belajar 9 tahun atau pendidikan kesetaraan.

- Apabila anak tersebut masih buta aksara, maka diwajibkan untuk mengikuti pendidikan keaksaraan fungsional di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) terdekat.
 - Apabila anak tersebut bekerja, maka data anak tersebut disampaikan kepada Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Pengurangan Pekerja Anak.
 - Apabila anak tersebut terpaksa di jalanan, atau disebut anak jalanan dan tidak sekolah lagi maka data anak tersebut akan didaftarkan dan disampaikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan di tingkat Kabupaten/Kota untuk mendapatkan Program Kesejahteraan Sosial Anak
3. Lansia 70 Tahun Keatas
- Pemeriksaan kesehatan untuk lansia dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan atau mengunjungi puskesmas santun lanjut usia (jika tersedia).
 - Mengikuti kegiatan sosial (day care).
4. Penyandang Disabilitas Berat
- Pemeliharaan kesehatan sesuai kebutuhan.
 - Pemeriksaan kesehatan dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan melalui kunjungan rumah (home care).

d. Pendampingan PKH

Pendampingan PKH adalah kegiatan fasilitasi, mediasi, dan advokasi bagi Keluarga Penerima Manfaat PKH dalam mengakses layanan fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Pendampingan PKH bertujuan memastikan anggota Keluarga Penerima Manfaat PKH menerima hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan dan persyaratan penerima manfaat PKH. Pendampingan PKH dilakukan oleh pendamping sosial.

Pendamping PKH bertugas:

- a. Memastikan Bantuan Sosial PKH diterima oleh Keluarga Penerima Manfaat PKH tepat jumlah dan tepat sasaran.
- b. Melaksanakan Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga bersama Keluarga Penerima Manfaat PKH paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan.
- c. Memfasilitasi Keluarga Penerima Manfaat PKH mendapatkan program bantuan komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lain.

5. Kemiskinan

Kemiskinan adalah suatu kondisi dimana masyarakat tidak mampu memenuhi kebutuhan pangan sandang maupun pangan di suatu daerah, kemiskinan tidak hanya menyebabkan tidak tercukupinya kebutuhan pokok, yang mana juga mengakibatkan rendahnya tingkat kesehatan dan pendidikan.

Menurut Chambers (1983:109), kemiskinan berkaitan dengan masalah deprivasi sosial, akses ke sumberdaya seperti air, tempat tinggal, layanan kesehatan dan sanitasi, pendidikan serta transportasi. Akar masalah kemiskinan adalah ketergantungan, isolasi, ketidakberdayaan (vulnerability) dan rendahnya harapan hidup.

Menurut Suparlan (2004:315) kemiskinan sebagai suatu standar tingkat hidup yang rendah, yaitu adanya suatu tingkat kekurangan pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang rendah ini secara langsung nampak pengaruhnya terhadap tingkat keadaan kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Mudhajir, menyatakan bahwa kemiskinan mencakup:

1. Kekurangan fasilitas bagi kehidupan yang normal
2. Gangguan dan tingginya resiko kesehatan
3. Resiko keamanan dan kerawanan kehidupan social ekonomi dan lingkungannya
4. Kekurangan pendapatan yang mengakibatkan tak bisa hidup layak
5. Kekurangan dalam kehidupan social yang dapat ditunjukan oleh ketersisihan dalam proses politik, dan kualitas pendidikan rendah

Menurut Nugroho (dalam sunartiningsih 2004:80) mengatakan bahwa kemiskinan itu terdiri dari beberapa dimensi yaitu :

1. Kemiskinan berdimensi ekonomi
2. Kemiskinan berdimensi sosial budaya

3. Kemiskinan berdimensi structural atau politik

Untuk menanggulangi masalah kemiskinan presiden mengeluarkan Perpres No. 15 tahun 2010 tentang penanggulangan kemiskinan yang mengklasifikasikan kemiskinan kedalam tiga kelompok, yaitu :

1. Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin, program ini meliputi jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) dan pada tahun 2014 menjadi BPJS, Beras untuk keluarga miskin (RASKIN), Bantuan Siswa Miskin (BSM) dan Program Keluarga Harapan (PKH).
2. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, program ini adalah PNPM Mandiri.
3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, yang bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil, Kredit Usaha Rakyat (KUR).

6. Efektivitas

Kata “efektif” berasal dari bahasa inggris yaitu effective yang berarti “berhasil” atau “sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik”, Kamus ilmiah

populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas menurut Agung Kurniawan (2005:109) adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) dari pada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak ada tekanan atau ketegangan didalam pelaksanaannya. Maksudnya efektifitas adalah tahap dicapainya keberhasilan suatu perencanaan atau hasil yang diharapkan dengan yang terjadi.

Hadayaningrat menyebutkan efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.(Suhendra et al., 2020)

Efektivitas menurut Ravianto (dalam Masruri, 2014:11) ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2017:134) Efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan efektif.

Dari pendapat mardiasmo tersebut dapat dipahami bahwa apabila suatu organisasi mencapai tujuan sesuai dengan yang telah direncanakan dan berjalan dengan baik maka itulah yang dinamakan dengan Efektivitas.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas adalah cara bagaimana untuk mencapai tujuan suatu organisasi dan hasil yang

sesuai dengan telah direncanakan, dan efektivitas selalu mengacu kepada pencapaian tujuan. Dan efektifitas juga merupakan hal yang terjadi akibat dari yang dilakukan.

7. Efektivitas Program

Menurut Joan L. Herman yang dikutip oleh Farida (2008:9) mengemukakan defenisi program sebagai “segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dengan harapan akan mendatangkan hasil atau pengaruh.

Hasibuan (2006:72) juga mengungkapkan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang jelas dan konkret karena didalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur, anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah di tetapkan.

Westra (1989:236) mengatakan bahwa program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara cara pelaksanaannya. Kemudian Jones (1996:295) berpendapat bahwa “program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan”. Lebih lanjut jones juga menjelaskan bahwa didalam program dibuat beberapa aspek, yaitu

1. Tujuan kegiatan yang akan dicapai
2. Kegiatan yang diambil dalam pencapaian tujuan
3. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
4. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
5. Strategi pelaksanaan

Menurut pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas program adalah cara bagaimana agar suatu program itu melaksanakan tujuannya sesuai

dengan yang direncanakan dan hasilnya sama dengan rencana. Yang didalamnya terdapat beberapa aspek yang diperlukan.

Selain itu arti program juga termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa “Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang di koordinasikan oleh instansi masyarakat.

Menurut Sutrisno (2007, 125-126) untuk mengukur efektivitas maka menggunakan indikator sebagai berikut :

1. Pemahaman Program
2. Tepat Sasaran
3. Tepat Waktu
4. Tercapainya Tujuan
5. Perubahan nyata

Selanjutnya pengertian Efektivitas menurut Makmur (2015:7) adalah ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang di capai. Kemudian menurut Makmur (2011:7-9), efektivitas dapat dilihat dari beberapa kriteria, yaitu

1. Ketepatan waktu.

Waktu adalah sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat

berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

2. Ketepatan perhitungan biaya.

Berkaitan dengan ketepatan dalam pemanfaatan biaya, dalam arti tidak mengalami kekurangan juga sebaliknya tidak mengalami kelebihan pembiayaan sampai suatu kegiatan dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Ketepatan dalam menetapkan satuan – satuan biaya merupakan bagian daripada efektivitas.

3. Ketepatan dalam pengukuran.

Dengan ketepatan ukuran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya sebenarnya merupakan gambaran daripada efektivitas kegiatan yang menjadi tanggung jawab dalam sebuah organisasi.

4. Ketepatan dalam menentukan pilihan.

Menentukan pilihan bukanlah suatu persoalan yang gampang dan juga bukan hanya tebakan tetapi melalui suatu proses, sehingga dapat menemukan yang terbaik diantara yang baik atau yang terjujur diantara yang jujur atau kedua-duanya yang terbaik dan terjujur diantara yang baik dan jujur.

5. Ketepatan berpikir.

Ketepatan berfikir akan melahirkan keefektifan sehingga kesuksesan yang senantiasa diharapkan itu dalam melakukan suatu bentuk kerjasama dapat memberikan hasil yang maksimal.

6. Ketepatan dalam melakukan perintah.

Keberhasilan aktivitas suatu organisasi sangat banyak dipengaruhi oleh kemampuan seorang pemimpin, salah satunya kemampuan memberikan perintah yang jelas dan mudah dipahami oleh bawahan. Jika perintah yang diberikan tidak dapat dimengerti dan dipahami maka akan mengalami kegagalan yang akan merugikan organisasi.

7. Ketepatan dalam menentukan tujuan.

Ketepatan dalam menentukan tujuan merupakan aktivitas organisasi untuk mencapai suatu tujuan.

8. Ketepatan sasaran.

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1 : Kajian Penelitian Terdahulu

NO	NAMA	JUDUL	PERBEDAAN	PERSAMAAN
1	MUNAWWA RAH SAHIB (2016)	Pengaruh Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap Penanggulangan Kemiskinan di kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa.	Variabel : Independen dan Dependen Metode : Kombinasi (mix) kuantitatif dan kualitatif Tahun : 2016	Program Keluarga Harapan sebagai Objek Penelitian
2	APRILIA SARASWATI	Analisis Pengaruh Program Keluarga	Variabel : Dependen dan	Program Keluarga

	(2018)	Harapan (PKH) Terhadap Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Pada Pekon Pandansurat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu)	Independen Metode : Kuantitatif Tahun : 2018	Harapan sebagai Objek Penelitian
3.	CUT RAZI MIRSANDI (2019)	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Memberikan Perlindungan Sosial pada Masyarakat (Studi diKecamatan Setia Kabupaten Aceh Barat Daya)	Variabel : Implementasi Teori : Model Edwar Tahun : 2019	Program Keluarga Harapan sebagai Objek Penelitian Metode Kualitatif
4.	EKY RISQIANA (2020)	Dampak Program Keluarga Harapan Terhadap Keluarga Miskin di Kabupaten Pekalongan (Studi Kasus di Kecamatan Wonopringgo)	Variabel : Kebijakan Publik Teori : Teori Implementasi Kebijakan Publik George Edward III	Program Keluarga Harapan sebagai Objek Penelitian Metode Kualitatif
5.	MONIKA YULIANA (2020)	Efektivitas Pengelolaan Program Keluarga Harpan (PKH) Untuk Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Pada Keluarga Penerima Manfaat di Ponorogo	Teori : Richard M. Steers Lokasi : Ponorogo	Program Keluarga Harapan sebagai Objek Penelitian Metode : Kualitatif Variabel : Efektivitas

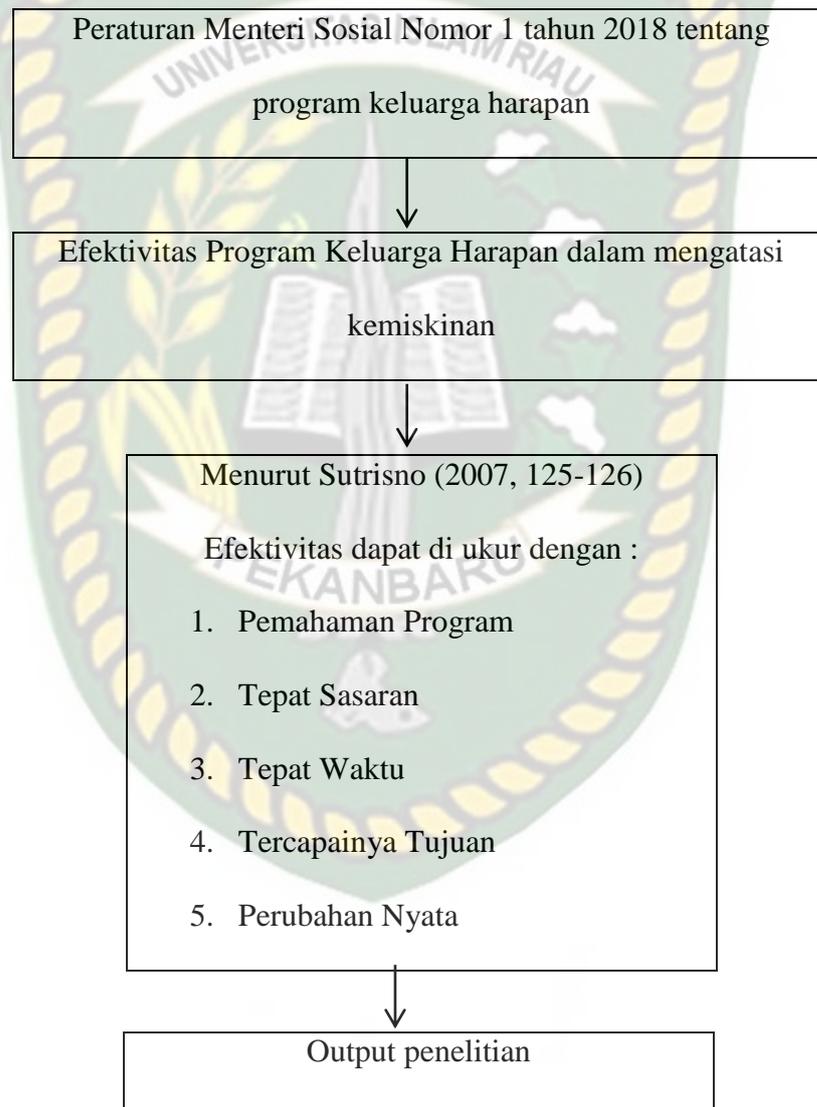
Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat perbedaan penelitian ini dari variabel penelitian ini adalah Efektivitas sedangkan variabel penelitian pada tabel diatas yaitu pengaruh kebijakan, analisis pengaruh, implementasi, kebijakan publik. Dan teori yang di gunakan pada penelitian ini adalah teori Efektivitas oleh (Sutrisno, 2007, 125-126) sedangkan teori penelitian pada tabel diatas yaitu implementasi, Efektivitas. Sedangkan persamaan pada penelitian ini dengan penelitian yang ada pada tabel diatas adalah terdapat pada objek penelitiannya yaitu program keluarga harapan.

C. Kerangka Pikir

Kerangka Pikir adalah serangkaian konsep dan kejelasan hubungan antar konsep tersebut yang dirumuskan oleh peneliti berdasarkan tinjauan pustaka, meninjau teori yang disusun dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan.

Gambar II.1 Kerangka Pikir



Sumber : Modifikasi Penelitian, 2021

D. Konsep Operasional

Untuk mempermudah dalam memahami dan menghindari kesalahan dalam menafsirkan, maka perlu dijelaskan istilah-istilah yang dipergunakan, adapun konsep-konsep yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu di masyarakat yang mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan.
2. Pemahaman program adalah sejauh mana masyarakat dapat memahami kegiatan program melalui pelatihan keterampilan maupun mengenai sosialisasi.
3. Tepat sasaran adalah pengetahuan yang telah diberikan para pengelola mengenai pemahaman pengetahuan tentang keterampilan menetapkan sasaran yang sesuai dengan program.
4. Tepat waktu adalah penggunaan waktu untuk pelaksanaan program yang telah direncanakan tersebut apakah telah sesuai dengan apa yang diharapkan.
5. Tercapainya tujuan adalah pencapaian tujuan kegiatan yang telah dijalankan baik melalui pelatihan program maupun kegiatan lainnya.
6. Perubahan nyata adalah sejauh mana program tersebut memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat.

E. Operasionalisasi Variabel

Adapun operasional variabel dari Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar adalah sebagai berikut :

Tabel II.2 : Konsep Operasional Variabel

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas adalah ketepatan harapan, implementasi dan hasil yang di capai Makmur (2015:7).	1. Pemahaman Program	<ul style="list-style-type: none"> a. Pelaksanaan Sosialisasi Program Kepada Masyarakat. b. Pelaksanaan Program dapat diterima di lingkungan masyarakat.
	2. Tepat Sasaran	<ul style="list-style-type: none"> a. Sasaran yang sesuai dengan tujuan Program. b. Pelaksanaan Program mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat.
	3. Tepat Waktu	<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan yang dilakukan oleh pengurus PKH sudah sesuai dengan waktu yang seharusnya b. Waktu pencairan dana terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
	4. Tercapainya Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Tercapainya Tujuan dari program yang dilaksanakan. b. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaan program, agar tujuan dari program tersebut dapat tercapai.
	5. Perubahan Nyata	<ul style="list-style-type: none"> a. Program dapat mengatasi masalah kemiskinan. b. Memberi keuntungan bagi Masyarakat.

Sumber : Modifikasi Penelitian 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif yang mana lebih banyak menggunakan logika, karena data yang didapatkan di lapangan bersifat informasi dan keterangan-keterangan. Menurut Sugiyono (2003 : 19) melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat, serta hubungan fenomena tertentu secara komprehensif dan integral. Dengan pendekatan Deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi, menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.

Menurut Bogdan Taylor sebagaimana (dikutip Moleong 2012) mengatakan bahwa “penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif, berupa kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”. Hal ini menunjukkan bahwa seorang peneliti harus terjun langsung kelapangan guna mencari dan mengamati tingkah laku dari subjek yang diteliti untuk mendapatkan pengakuan, baik secara lisan maupun tulisan agar menghasilkan data deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan ini terletak pada kelurahan batu bersurat kecamatan XIII koto Kampar kabupaten Kampar. Alasan dilakukannya penelitian di Kelurahan Batu Bersurat ini karena adanya hal yang menarik untuk dikaji.

C. Key Informan dan Informan Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menentukan key informan dengan teknik purposive, yaitu pemilihan informan berdasarkan ciri-ciri atau karakteristik tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. Dengan digunakannya teknik purposive ini diharapkan supaya informan dapat menjelaskan, memahami serta memberikan informasi secara akurat terhadap permasalahan yang terdapat pada penelitian ini. Adapun key informan yang peneliti pilih adalah Pendamping PKH bernama Gusrimardy, S.H sebagai subjek penelitian. Selanjutnya peneliti memilih informan sesuai dengan tabel dibawah ini :

Tabel III.1 : Informan Penelitian

No	Nama/Jumlah	Jabatan	Pendidikan/ Jumlah sampel	Keterangan
1.	Zamzaris, S.Ikom	Administrasi pangkalan data (operator kabupaten)	S1 (1 orang)	Adanya pertimbangan tertentu dan tahu mengenai keadaan yang sebenarnya
2.	2 orang KPM PKH	KPM PKH berdasarkan Komponen Kesehatan, Pendidikan	SMP-SMA	Dilakukan dengan menggunakan random sampling (elemen secara acak)
3.	2 orang masyarakat miskin yang tidak terdaftar kedalam	Masyarakat miskin yang tidak terdaftar	SMP-SMA	Dilakukan dengan menggunakan random sampling

	program PKH	dalam PKH		(elemen secara acak)
--	-------------	-----------	--	----------------------

Sumber : Modifikasi Penulis, 2021

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik penentuan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang ingin di ketahui sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.

(Sugiyono, 2012:54)

Dimana informan menjadi sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling atau pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan. Informan yang dimaksud adalah informan yang terlibat langsung atau informan yang dianggap mempunyai kemampuan dan mengerti permasalahan terkait Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

E. Sumber Data

Data adalah sekumpulan bukti atau fakta yang dikumpulkan dan disajikan untuk tujuan tertentu. Informasi atau keterangan. Sumber data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh atau di kumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian. Data primer di peroleh dari hasil wawancara dengan informan. dimana pemilihan informan dipilih dengan teknik purposive berdasarkan kriteria yang telah di tentukan dan menggunakan beberapa orang lain sebagai key informan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang di kumpulkan atau di peroleh oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data diperoleh dari kepustakaan, studi dokumentasi atau dari laporan penelitian terdahulu. Sehingga data skunder dalam penelitian ini dapat di peroleh melalui buku, catatan-catatan, arsip, dan dokumen-dokumen lain yang dapat di gunakan sebagai informasi yang berkaitan dengan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan dalam pengumpulan data primer maupun data sekunder dilakukan dengan suatu penelitian secara seksama, yaitu dengan cara :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian mengenai fenomena yang terjadi kemudian dilakukan pencatatan. Data yang telah dikumpulkan diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif yaitu menyajikan data secara rinci dan melakukan interpretasi teoritis sehingga dapat di peroleh gambaran akan suatu penjelasan dan kesimpulan yang memadai.

2. Interview / Wawancara

Interview adalah teknik pengumpulan data yang di gunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti. Ini merupakan sebuah proses untuk menggali informasi secara langsung dan mendalam sebagai data primer. Wawancara mendalam ini di lakukan dengan informan yang di anggap memiliki representasi informasi yang relevan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menghasilkan dokumen dokumen dengan melampirkan bukti yang akurat atas informasi yang di dapatkan dari narasumber dan dokumen yang berkaitan dengan penelitian kemudian dilakukan pencatatan.

G. Teknik Analisa Data

Pada dasarnya proses analisis data itu di mulai dari menelaah data secara keseluruhan yang telah tersedia dari berbagai macam sumber, baik itu pengamatan, wawancara, catatan lapangan dan yang lainnya. Metode pengolahan data dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu proses secara sistematis mencari dan mengolah berbagai data yang bersumber dari wawancara, pengamatan lapangan, dan kajian dokumen (pustaka) untuk menghasilkan suatu laporan temuan penelitian .

Menurut Bogdan dan Biklen (Lexy J. Moleong, 2012: 248) analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif deskriptif. Miles dan Huberman (Sugiyono : 2008) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jelas.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan mencari, mencatat, dan mengumpulkan data melalui hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi yang terkait dengan Efektivitas Program Keluarga Harapan.

2. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan

pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan (Sugiyono, 2008:247). Dalam penelitian ini setelah melakukan pengumpulan data, data-data yang terkait dengan Efektivitas Program Keluarga Harapan di Kelurahan Batu Bersurat direduksi untuk digolongkan kedalam tiap permasalahan sehingga data dapat ditarik kesimpulannya.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penyajian data, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Dengan adanya display data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut (Sugiyono, 2008:249). Penyajian data dilakukan untuk mempermudah peneliti untuk dapat mendeskripsikan data sehingga akan lebih mudah memahami Program Keluarga Harapan yang diteliti.

4. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya (Sugiyono, 2008:252). Pada penelitian ini, kesimpulan awal yang dikemukakan oleh peneliti akan didukung oleh data-data yang diperoleh peneliti di lapangan. Jawaban dari hasil penelitian akan

memberikan penjelasan dan kesimpulan atas permasalahan penelitian yang diteliti dalam penelitian ini.



Dokumen ini adalah Arsip Miitik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

H. Jadwal Kegiatan Penelitian

Adapun Jadwal kegiatan penelitian yang peneliti lakukan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar

No	Jenis Kegiatan	Bulan Dan Minggu 2020-2021																			
		Des				Feb				Juli				Okt				Des			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Persiapan dan Penyusunan UP	■	■	■	■																
2	Seminar UP					■	■	■	■												
3	Perbaikan UP									■	■	■	■								
4	Pembuatan Daftar Wawancara													■	■	■	■				
5	Pengurusan rekomendasi penelitian																	■	■	■	■
6	Penelitian Lapangan																				
7	Penelitian dan analisis data																				
8	Penyusunan laporan penelitian (skripsi)																				
9	Konsultasi perbaikan skripsi																				
10	Ujian Skripsi																				
11	Revisi Skripsi																				
12	Penggandaan Skripsi																				

Sumber : Modifikasi Penulis 2021

I. Rencana Sistematika Laporan Kegiatan

Agar tidak terjadi kekeliruan, maka disusun Rencana Sistematika Laporan Penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Tujuan serta Kegunaan Penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Terdiri dari studi kepustakaan, kerangka piker, hipotesis, konsep operasional dan operasional variabel.

BAB III : METODE PENELITIAN

Terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal kegiatan penelitian serta rencana sistematika laporan penelitian.

BAB IV : GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

Terdiri dari keadaan geografis, keadaan penduduk , dan keadaan pemerintahan.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari identitas responden, Hasil Pembahasan dan Hambatan.

BAB VI : PENUTUP

Terdiri dari Kesimpulan, Saran dan Daftar Kepustakaan.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Batu Bersurat

Kelurahan Batu Bersurat adalah suatu wilayah Kelurahan yang berada di Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar. Awalnya Batu Bersurat adalah sebuah desa. Dari sebuah desa memiliki bagian-bagian wilayah. Wilayah tersebut adalah Batu Bersurat, Binamang, Koto Tengah dan Lubuk Agung. Masing-masing wilayah tersebut dipimpin oleh seorang Rukun Kampung (RK). Batu Bersurat merupakan Ibu Kota Kecamatan XIII Koto Kampar. Pada tahun 1980 Desa Batu Bersurat diganti dari status Desa menjadi Kelurahan yaitu Kelurahan Batu Bersurat. Pada tahun 1990 Pemerintahan menetapkan bahwa di Kabupaten Kampar akan dibangun Waduk PLTA Koto Panjang. Waduk PLTA Koto Panjang berada dalam kawasan sungai Kampar, dan masyarakat Kelurahan Batu Bersurat berada sepanjang sungai kampar. Dengan ditetapkannya pembangunan PLTA Koto Panjang, maka penduduk desa sepanjang dampak PLTA Koto Panjang akan diganti rugi oleh Pemerintah.

Tahun 1991 pendataan dan ganti rugi tanah dimulai. Sejalan dengan pendataan tersebut Pemerintah mulai memperhitungkan lokasi penempatan masyarakat atau pemindahan warga. Tahun 1995 pemindahan masyarakat dimulai khususnya Kelurahan Batu Bersurat. Penduduk Kelurahan Batu Bersurat yang jumlah penduduknya cukup banyak, maka oleh Tokoh Masyarakat wilayah-wilayah tersebut diatas dipisahkan penempatannya. Hal ini juga karena ketersediaan lahan dan pemukiman masyarakat kurang tersedia. Penempatan warga oleh Dinas

Transmigrasi dibagi menjadi Satuan Pemukiman (SP). Dengan terpisahnya penempatan warga oleh Dinas Transmigrasi, maka secara bertahap disiapkan menjadi Desa. Tahun 1996 Koto Tengah (Ranah Sungkai saat ini) dan Lubuk Agung terpisah dari Kelurahan Batu Bersurat sebagai Desa Induk. Tahun 1999 dilaksanakan pemekaran Desa dari Kelurahan Batu Bersurat yaitu Desa Binamang, sebelumnya adalah wilayah Kelurahan Batu Bersurat. Kelurahan Batu Bersurat sebelum dipindahkan ke lokasi baru masyarakatnya adalah petani padi sawah dan perkebunan karet. Luas lahan sawah \pm 150 Ha dan memiliki mata pencarian khususnya perkebunan karet. Luas Wilayah Kelurahan Batu Bersurat adalah 6.8 KM².

Kelurahan Batu Bersurat terletak didalam wilayah Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Ranah Sungkai
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Alai
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pangkalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Binamang

kepala kelurahan dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan membagi Kelurahan Batu Bersurat menjadi tiga lingkungan yang terdiri dari 8 RW dan 16 RT. Berikut deskripsi Kelurahan Batu Bersurat secara rinci :

a. Jumlah Penduduk Kelurahan Batu Bersurat

Penduduk Kelurahan Batu Bersurat pada tahun 2020 berjumlah 2699 jiwa dengan KK (Kepala Keluarga) berjumlah 750 KK.

Tabel IV.1 : Jumlah Penduduk Kelurahan Batu Bersurat

NO	RT	KK	Jiwa		
			Lk	Pr	Jumlah
1	001	51	112	99	211
2	002	67	117	111	228
3	003	68	125	126	251
4	004	51	108	104	212
5	005	57	113	103	216
6	006	47	92	81	173
7	007	47	96	79	175
8	008	38	66	58	124
9	009	46	106	75	181
10	010	46	72	82	154
11	011	50	90	97	187
12	012	48	89	77	166
13	013	38	61	56	117
14	014	34	60	46	106
15	015	36	56	44	100
16	016	26	53	45	98
Total		750 kk	1416	1264	2699

Sumber : Data Kelurahan Batu Bersurat

Berdasarkan tabel diatas dapat dipahami bahwa jumlah penduduk terbanyak terdapat di RT 003 sebesar 246 jiwa yang terdiri dari 125 laki laki dan 121 perempuan, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di RT 16 yang berjumlah 98 jiwa yang terdiri dari 55 laki laki dan 45 perempuan. Dikelurahan Batu bersurat ini terdapat tiga suku asli masyarakat, yaitu suku Domo, suku Melayu, dan suku Pitopang.

b. Agama

Kelurahan Batu Bersurat yang jumlah masyarakatnya terdiri dari 2699 jiwa dengan 750 KK terdiri dari berbagai suku yang berbeda, namun kehidupan masyarakatnya berjalan dengan baik, yang mana agama yang dipercayai penduduk kelurahan Batu Bersurat adalah agama islam. Di kelurahan Batu Bersurat sendiri terdapat sarana rumah ibadah yang telah disediakan, yang jumlahnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.2 : Jumlah Rumah Ibadah di Kelurahan Batu Bersurat

No	Nama Rumah Ibadah	Jumlah
1	Masjid	3
2	Mushollah	7
	Jumlah	10

Sumber : Kantor Lurah Batu Bersurat Tahun 2021

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah rumah ibadah di Kelurahan Batu Bersurat berjumlah 10 buah, yang mana terdiri dari 3 masjid dan 7 mushollah, secara keseluruhan merupakan rumah ibadah untuk umat muslim, sedangkan rumah ibadah untuk non muslim tidak tersedia.

c. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan Negara, maka untuk menunjang pendidikan yang baik bagi anak bangsa maka di Kelurahan Batu Bersurat disediakan sarana pendidikan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.3 : Jumlah Sekolah di Kelurahan Batu Bersurat

No	Jenis sekolah	Jumlah
1	Tk/paud	1
2	Sd	2
3	Smp	2
4.	Sma	2
Jumlah		7

Sumber : Kantor Lurah Batu Bersurat 2021

d. Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Batu Bersurat

Umumnya mata pencaharian penduduk Kelurahan Batu Bersurat terdiri dari pertanian, perdagangan, pegawai negeri sipil, perikanan.

Tabel IV.4 : Mata Pencaharian Penduduk Kelurahan Batu Bersurat

No	Status mata pencaharian	Jumlah
1	Pegawai Negeri Sipil	77
	- Guru	57
	- ABRI	46
	- PNS Lainnya	26
	- Pensiun PNS/ABRI	22
2	Peg. BUMN	-
3	Petani / pekebun	703
4	Nelayan	300
5	Wirausaha / Pedagang	56
Jumlah		1.206

Sumber : Kantor Lurah Batu Bersurat tahun 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa mata pencaharian yang umumnya paling banyak di Kelurahan Batu Bersurat adalah petani yang berjumlah 703 orang.

e. Organisasi Dan Tata Laksana

Berdasarkan peraturan Daerah No 3 tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Kelurahan Batu Bersurat terdiri dari :

1. Lurah
2. Sekretaris
3. Kelompok Jabatan Fungsional yang terdiri dari :

- f. Seksi pemerintah
- g. Seksi pelayanan umum
- h. Seksi kesejahteraan sosial
- i. Seksi ketentraman dan ketertiban sosial

a. Tugas Pokok dan Fungsi

1. Lurah

a. Tugas

Seorang lurah mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan ketertiban umum serta melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh camat.

b. Fungsi

Lurah memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan di kelurahan
2. Pelaksanaan kegiatan ekonomi dan pembangunan
3. Pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan

c. Uraian tugas

1. Memimpin organisasi kelurahan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan sesuai dengan Visi dan Misi Kelurahan Batu Bersurat.

2. Merumuskan rencana kedepan untuk melaksanakan uruaan yang dilimpahkan oleh camat dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.
3. Merumuskan Rencana Stratejik (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Daerah (RKPD) sesuai lingkup tugasnya.
4. Mengendalikan administrasi keuangan dan asset di lingkup tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Mengkoordinasikan penanganan bencana di wilayah kelurahan.
6. Menyusun rencana pembangunan tahunan kelurahan dan rencana pembangunan (MUSREMBANG) tingkat kelurahan.
7. Menyelenggarakan administrasi pertahanan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
8. Menyelenggarakan administrasi tata pemerintahan, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan, pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
9. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan terhadap terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup seta pola pencegahan keruskan lingkungan hidup.
10. Menyelenggarakan fasilitasi kegiatan dalam rangka pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum.
11. Melaksanakan pembangunan partisipasi masyarakat dan pelayanan umum kepada masyarakat dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.

12. Melaksanakan pembinaan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemeritahan kelurahan.
13. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya.
14. Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan lingkup tugas sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
15. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
16. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
17. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan atau kegiatan pada atasan.
18. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan.
19. Melaksanakan koordinasi instansional dan kemasyarakatan.
20. Merumuskan dan melaksanakan kerjasama kelurahan dengan kelurahan lainnya dalam suatu wilayah kecamatan.

2. Sekretaris

a. Tugas

Sekretaris bertugas untuk membantu lurah dalam melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan yang meliputi administrasi, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

b. Fungsi

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi lurah.
2. Penyelenggaraan koordinasi dan pengendalian atas pelaksanaan pengurusan kebijakan yang ditentukan oleh lurah.
3. Pelaksanaan pengurusan administrasi kepegawaian.
4. Pengelola administrasi keuangan.
5. Pelaksanaan urusan perlengkapan dan kerumahtanggaan lurah.
6. Pelaksanaan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas seksi dan kelompok jabatan fungsional.
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh lurah.
8. Penyelenggaraan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara-acara kedinasan lainnya diluar kegiatan yang telah tercakup dalam kegiatan seksi lain.
9. Pelaksanaan pengurusan surat menyurat dan kearsipan
 - c. Uraian tugas
 1. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi lurah, serta pelaksanaan tugas dan fungsi tata usaha kelurahan.
 2. Menyusun Rencana Stratejik (RENSTRA), Rencana Kinerja (RENJA), Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD), dan Rencana Kerja Daerah (RKPD) sesuai lingkup tugasnya.
 3. Menyelenggarakan administrasi keuangan dan asset di lingkungan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dari masing-masing seksi pada kelurahan.
5. Melaksanakan ketatausahaan , surat menyurat dan kearsipan.
6. Melaksanakan kepengurusan administrasi kepegawaian.
7. Melaksanakan urusan analisa kebutuhan, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan sarana dan prasarana kantor kelurahan.
8. Menyelenggarakan kerumah tanggan kelurahan.
9. Menghimpun bahan-bahan persiapan dan pelaksanaan rapat-rapat dinas, upacara, penerimaan tamu dan acara kedinasan lainnya.
10. Melaksanakan koordinasi perencanaan, evaluasi dan pelaporan tugas-tugas seksi dan kelompok jabatan fungsional.
11. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup tugasnya serta mencari alternative pemecahannya.
12. Mempelajari, memahami, dan melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
13. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan.
14. Memberi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar peklaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
15. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas atau kegiatan kepada atasan.
16. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Bertugas untuk melaksanakan kegiatan teknis sebagian tugas kelurahan sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing dan dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior dalam kepangkatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada lurah. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari :

a. Seksi Pemerintahan

1. Tugas

Bertugas untuk membantu lurah melaksanakan pembinaan pemerintah kelurahan dan pembinaan rukun warga.

2. Fungsi

- a. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan pemerintahan kelurahan.
- b. Melaksanakan penyusunan rencana kerja pemerintahan kelurahan.
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat yang terkait dalam pemerintahan.
- d. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi pemerintahan.
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dengan lurah.
- f. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Ketua RW dan Ketua RT, serta membantu penyelesaian proses administrasinya.
- g. Melaksanakan administrasi pertanahan.
- h. Melaksanakan fasilitas kegiatan dalam rangka pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden.

- i. Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan yang terjadi serta mencari alternatif pemecahannya.
- j. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- k. Menghadiri rapat, baik yang diadakan oleh tingkat kecamatan maupun pemerintahan kota.
- l. Menyampaikan laporan hasil rapat dan pelaksanaan tugas atau kegiatan lainnya kepada atasan.
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan alasan.

b. Seksi Pelayanan Umum

1. Tugas

Tugas seksi pelayanan umum adalah memberi petunjuk, memberi tugas, membimbing, memeriksa, mengoreksi, mengawasi dan merencanakan kegiatan operasional urusan penyelenggaraan pelayanan umum kelurahan.

2. Fungsi

- a. Perencanaan kegiatan kerja seksi pelayanan umum.
- b. Pemberian petunjuk pelaksanaan urusan penyelenggaraan pelayanan umum kelurahan.
- c. Pembagian tugas pelaksanaan seksi pelayanan umum.
- d. Pembimbingan pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum.
- e. Pemeriksaan dan pengawasan pelaksanaan urusan penyelenggaraan pelayanan umum kelurahan.

- f. Pengoreksian pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum.
- g. Pengawasan bawahan dalam lingkup bidang tugasnya.
- h. Pelaporan pelaksanaan tugas seksi pelayanan umum.
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya berdasarkan arahan atasan dalam lingkup bidang tugasnya.

c. Seksi Kesejahteraan Sosial

1. Tugas

Membantu lurah dalam menyiapkan bahan penyusunan program dan pelaksanaan pembinaan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

2. Fungsi

- a. Penyusunan program pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
- b. Pemberian layanan kepada masyarakat dibidang ekonomi dan pembangunan.
- c. Penyusunan rencana program dan kegiatan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
- d. Pengkoordinasian upaya pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.
- e. Pelaksanaan fasilitas kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.,
- f. Pelaksanaan pemberian layanan terhadap kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan rakyat.

d. Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

1. Tugas

Membantu kelurahan melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum serta pembinaan perlindungan masyarakat.

2. Fungsi

- a. Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan pembinaan ketentraman dan ketertiban umum.
- b. Penyelenggaraan penegakan peraturan daerah, peraturan walikota, keputusan kepala daerah dan perundang-undangan lainnya di kelurahan.
- c. Pelaksanaan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat dan anggota LINMAS di kelurahan.
- d. Pelaksanaan penertiban terhadap gangguan sosial.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Struktur Organisasi

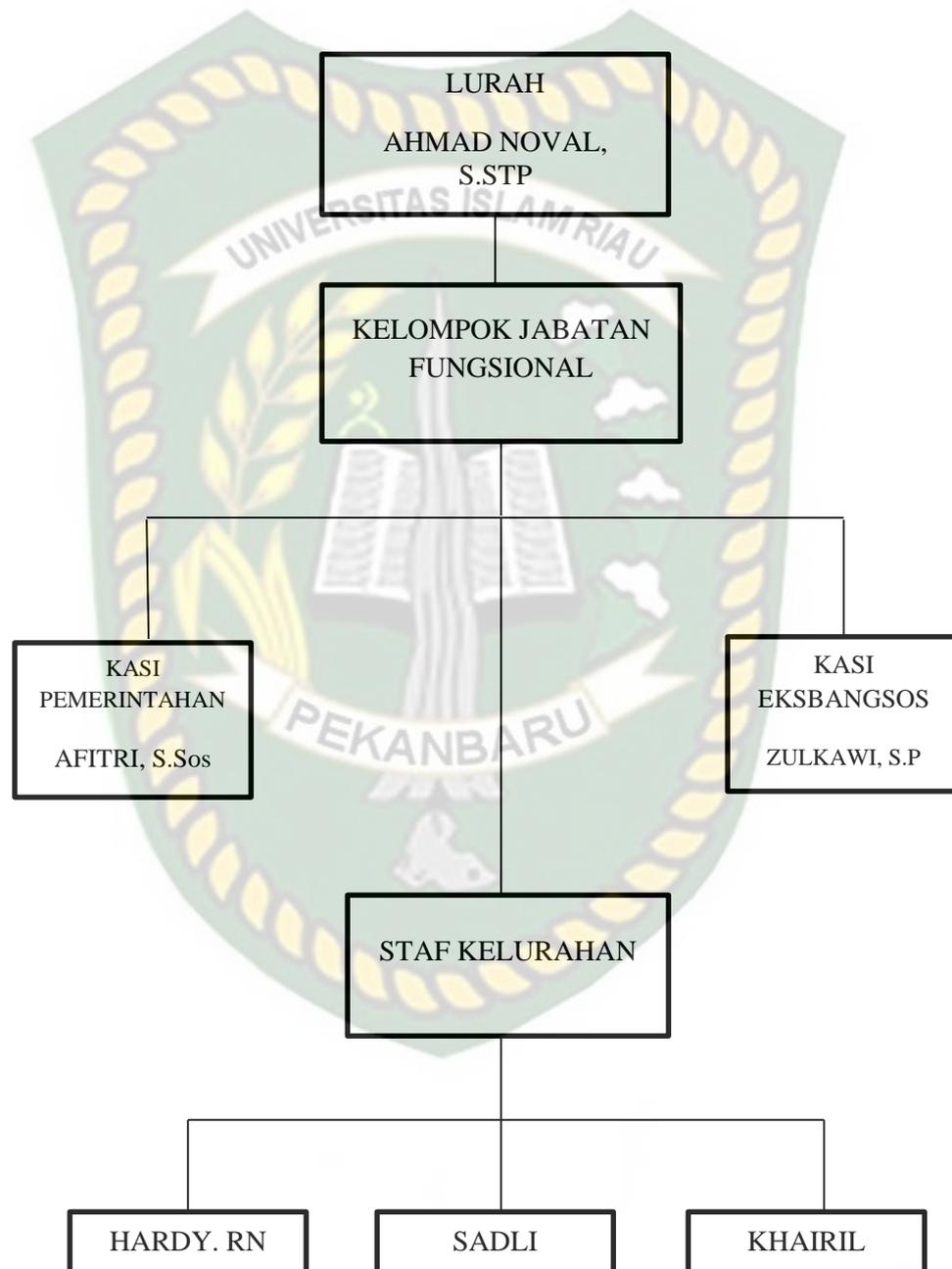
Untuk melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, maka dibentuk suatu organisasi kantor lurah batu bersurat kecamatan XIII koto Kampar yang susunannya sebagai berikut :

1. Lurah
2. Sekretaris
3. Kelompok Jabatan Fungsional
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Pelayanan Umum
 - c. Seksi Kesejahteraan Sosial

- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Sosial.

Gambar IV.1

Struktur Bagan Organisasi Kantor Kelurahan Batu bersurat



B. Gambaran Program Keluarga Harapan Di Kelurahan Batu Bersurat

Untuk mengatasi masalah kemiskinan, Indonesia mengeluarkan program pemerintahan yang membantu mengatasi masalah tersebut, salah satunya adalah program keluarga harapan, program ini dilaksanakan pada tahun 2007 namun baru bisa dilaksanakan di kelurahan batu bersurat pada tahun 2011.

Keluarga penerima manfaat yang mendapatkan program keluarga harapan berkewajiban untuk menyekolahkan anaknya dan wajib mengikuti pertemuan kelompok yang bertujuan untuk membentuk KPM agar mempunyai usaha sehingga KPM dapat keluar dari masalah kemiskinan. Hal ini dikarenakan KPM tersebut tidak akan mendapatkan bantuan selamanya.

Setiap desa mempunyai pendamping untuk program keluarga harapan ini, di kelurahan batu bersurat sendiri pendamping PKH nya adalah Gusrimardy, S.Sos. KPM yang telah mendapatkan PKH pertama atau dari tahun 2011 berjumlah 104 KK, namun telah terjadi pengurangan dan penambahan KPM sehingga pada tahun 2020 dinyatakan bahwa jumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan berjumlah 155.

Kebanyakan dari keluarga penerima manfaat PKH telah mempunyai usaha dari bantuan Program Keluarga Harapan. Usaha tersebut adalah ternak kambing, warung sembako, menjual kue, dan sebagainya. Berikut adalah nama-nama keluarga penerima manfaat program keluarga harapan:

Tabel IV.5 : Jumlah penerima manfaat Program Keluarga Harapan 2020

No	Penerima Manfaat	Nama KPM	Alamat
1	Pendidikan	ASNIL WATI	001
2	Pendidikan	YURLIATI	001
3	Pendidikan	MURIATI	001
4	Pendidikan	NURIANIS	001
5	Kesehatan	NELVA YARNI	001
6	Pendidikan	IJUS MAHARANI	001
7	Kesehatan	DASLISMAR	002
8	Kesehatan	NURAINI	002
9	Pendidikan	AMNIATI	002
10	Kesehatan	MAIMANAH	002
11	Kesehatan	MISRAWATI	002
12	Pendidikan	SAPRINA	002
13	Pendidikan	ASNI WATI	002
14	Pendidikan	ASNIL WATI	002
15	Pendidikan	IMAR	002
16	Kesehatan	ILIS	002
17	Pendidikan	LISMAWARNI	002
18	Kesehatan	SANTI	003
19	Pendidikan	ZUBAIDAH	003
20	Kesehatan	DAMILAS	003
21	Pendidikan	SARIANI	003
22	Pendidikan	ERLINA	003
23	Pendidikan	MISMAR	003
24	Pendidikan	RAMUNAWARA	003
25	Pendidikan	NELI HARNIATI	003
26	Pendidikan	FITRA WATI	003
27	Kesehatan	NURJANNAH	003
28	Pendidikan	RASMI	003
29	Pendidikan	MARTINIS	003
30	Pendidikan	NURBAITI	003
31	Pendidikan	YENI MARLINA	003
32	Pendidikan	MISLAINI	003
33	Pendidikan	MAHLIDA YANI	003
34	Pendidikan	WARNI	003
35	Pendidikan	YUSMIATI	003
36	Pendidikan	SURAIYA	003
37	Pendidikan	RISMALENA	003
38	Pendidikan	EKA FITRI	003
39	Pendidikan	YANTI SUSPITA	003
40	Pendidikan	ROHIMA	003
41	Pendidikan	MUSLINA	003
42	Pendidikan	WIJDA WATI	003
43	Kesehatan	ERNA WATI	003

44	Pendidikan	RUH KASNI	003
45	Kesehatan	NURHAYATI	003
46	Kesehatan	OSNI ZARIA	003
47	Pendidikan	ZARIDATI	003
48	Kesehatan	NURASMA	003
49	Pendidikan	NURHALIMAH	003
50	Pendidikan	MARTINIS	003
51	Pendidikan	ASNIL AMANI	003
52	Pendidikan	RIKA GUSYANTI	003
53	Pendidikan	ELI MARLINA	003
54	Pendidikan	MUZALIPA	003
55	Pendidikan	ASNA MULYANI	004
56	Pendidikan	GUSNIMAR	004
57	Pendidikan	ROHANI	004
58	Pendidikan	ELI SUSANTI	004
59	Pendidikan	ZAINIDAR	004
60	Pendidikan	SARBIATI	004
61	Pendidikan	NURHUDA	004
62	Pendidikan	HIMAYATI	004
63	Kesehatan	YUSNIDA	004
64	Pendidikan	ASTUTI	004
65	Pendidikan	SALNIATI	004
66	Pendidikan	DELIANA SISKA	004
67	Pendidikan	MARIANA	004
68	Pendidikan	MARIANIS	005
69	Pendidikan	ASNITA MARNI	005
70	Kesehatan	JUSMIATI	005
71	Pendidikan	RUKAIYAH	005
72	Pendidikan	ASNIWARI	005
73	Pendidikan	ROUDOTI	005
74	Pendidikan	SUSI LINDA DESWITA	005
75	Pendidikan	ROSMIATI	005
76	Pendidikan	ERMI YANTI	005
77	Pendidikan	BASMA	005
78	Pendidikan	HAYATUN NUPUS	005
79	Pendidikan	YOSI YOSMITA	005
80	Kesehatan	NAILIL AMANI	005
81	Kesehatan	MARDENTI	005
82	Kesehatan	YUNIFA SUSANTI	005
83	Pendidikan	MULPIZA	005
84	Pendidikan	JASMANIDAR	005
85	Pendidikan	ROSMINA	005
86	Pendidikan	FITRI YANTI	005
87	Pendidikan	SRI KARDIATI	005

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

88	Pendidikan	NURASNA WATI	005
89	Pendidikan	ELIZAR WATI	005
90	Pendidikan	NUR FITRI YANA	005
91	Pendidikan	HULPA MERI	005
92	Pendidikan	MUSTAKIMAH	006
93	Pendidikan	MISRA WATI	006
94	Pendidikan	NURBAYANI	006
95	Pendidikan	DENI AFRILA	006
96	Pendidikan	YENI	006
97	Pendidikan	ISLANI	006
98	Pendidikan	SRI WAHYUNI	006
99	Pendidikan	MARNIS	006
100	Pendidikan	YUNIAR	006
101	Pendidikan	MARDIANIS	006
102	Pendidikan	DEWI MARLINA	006
103	Pendidikan	NAILISSYAADAH	006
104	Pendidikan	ROSIMA	006
105	Pendidikan	FITRI WAHYUNI	006
106	Pendidikan	MISWATI	006
107	Pendidikan	JASMINAR	006
108	Pendidikan	SARIYATI	007
109	Kesehatan	ELVI YATI Z	007
110	Pendidikan	ANEL PISDAWATI	007
111	Pendidikan	NURLAINI	007
112	Pendidikan	MARDIANA	007
113	Pendidikan	NURBAITI	007
114	Pendidikan	NURHALIMAH	007
115	Pendidikan	NAILIZA	007
116	Pendidikan	KHOLINAH	007
117	Pendidikan	MIHEL OKTIKA	007
118	Pendidikan	YASMINA	007
119	Pendidikan	ANISWATI	007
120	Pendidikan	YUSMARNI	007
121	Kesehatan	DESI BAHARDI	007
122	Pendidikan	YENI MARLINA	007
123	Pendidikan	ASNIL MUNA	007
124	Kesehatan	ASNIL KHOTIMAH	008
125	Pendidikan	LISMARNI	008
126	Kesehatan	LENI MARLINA	008
127	Pendidikan	DESNI MAR	008
128	Pendidikan	HASNAH	008
129	Pendidikan	BETTI OPRINA	008
130	Pendidikan	NURLENA	009
131	Pendidikan	SYAMSUWARNI	009

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

132	Pendidikan	ELIZA WATI	009
133	Kesehatan	SUGINAH	009
134	Pendidikan	ELPIANIS	010
135	Pendidikan	LELA GUSTIANA	010
136	Pendidikan	AGUSTINAR	010
137	Kesehatan	MARLAINI	010
138	Kesehatan	NURAINI	010
139	Kesehatan	AMRINA	010
140	Pendidikan	RINEL ANDRIANI	011
141	Pendidikan	TITIK ABSAH	011
142	Pendidikan	HENDRA YONI	011
143	Pendidikan	SAPUTRA	011
144	Kesehatan	YETRI MARNI	011
145	Kesehatan	NURHALIMAH	011
146	Kesehatan	ERMAWATI	012
147	Kesehatan	ROSDIANA	012
148	Kesehatan	DEWI SARTIKA	012
149	Kesehatan	SARIDA NURAINI	012
150	Pendidikan	NURHIDA	012
151	Pendidikan	LINDA SEFRIYANTI	013
152	Pendidikan	ITA HERLINA	013
153	Pendidikan	NURASNI	013
154	Pendidikan	ERMA WATI	013
155	Pendidikan	SARIPA	013

Sumber : pendamping PKH

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah KPM yang paling banyak mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan berada di RT 003 yakni berjumlah 37 keluarga.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Responden

Dalam suatu penelitian banyak sekali muncul pertanyaan dari pembaca, yaitu pertanyaan mengenai identitas dari informan penelitian, pertanyaan ini sangatlah wajar. Jadi pada dasarnya dalam suatu penelitian sangatlah penting untuk menjelaskan identitas informan, informan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang di perkirakan dapat mengetahui keadaan yang sebenarnya dan dapat menjawab pertanyaan peneliti dengan tepat dan jelas. Informan tersebut adalah pendamping PKH, operator administrasi pangkalan data, keluarga penerima manfaat PKH, dan masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH) .

Dalam penelitian tentang efektivitas program keluarga harapan dalam mengatasi kemiskinan di kelurahan batu bersurat ini peneliti akan menjelaskan tentang identitas informan yang di teliti. Hal hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah tentang jenis kelamin, usia dan pendidikan informan.

Untuk mengetahui identitas key informan dan informan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel V.1 : Identitas Informan Penelitian tentang Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Gusrimardy, S.sos	Pendamping PKH	Key informan
2.	Zamzaris, S.Ikom	Operator Kabupaten	Informan

3.	Ita Herlina	Keluarga Penerima Manfaat PKH	Informan
4.	Nur Asni	Keluarga Penerima Manfaat PKH	Informan
5.	Nur Atika	Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH	Informan
6.	Nurina	Masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH	Informan

Sumber : Data Olahan Peneliti tahun 2021

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa informan yang peneliti gunakan dalam observasi ini berjumlah enam orang yaitu satu key informan adalah pendamping Program Keluarga Harapan Kecamatan XIII Koto Kampar, dan enam orang informan yaitu terdiri dari satu orang operator Program Keluarga Harapan Kabupaten Kampar, dua orang keluarga penerima manfaat PKH, dan dua orang masyarakat miskin yang tidak mendapatkan bantuan PKH.

1. Usia Informan

Usia adalah faktor yang dapat memberikan kejelasan mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. Usia Informan yang sesuai akan memudahkan penganalisaan dan pemahaman informan terhadap pertanyaan wawancara yang diberikan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan oleh peneliti. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan kriteria usia informan, yaitu :

Tabel V.2 : Identitas Key Informan dan Informan dalam penelitian Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar berdasarkan kriteria usia.

No	Tingkat Usia	Jumlah	Persentase (%)
1	25-40	3	50%
2	40-55	2	35%
3	55-70	1	15%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Pendamping PKH, Operator PKH Kabupaten Kampar, keluarga penerima manfaat PKH, serta masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan PKH di Kelurahan Batu Bersurat terdiri dari 3 orang dengan kriteria usia 25-40 tahun dengan persentase 50%, 2 orang dengan kriteria usia 40-55 tahun dengan persentase 35%, dan 1 orang dengan kriteria usia 55-70 tahun dengan persentase 15%.

2. Jenis Kelamin

Pada suatu penelitian, jenis kelamin informan tidak mempengaruhi hasil penelitian selama informan tersebut memberikan informasi yang benar adanya. Jenis kelamin tidak mempengaruhi hasil penelitian karena tidak dijadikan acuan untuk menentukan cara berfikir maupun pemahaman terhadap suatu masalah penelitian.

Tabel V.3 : Identitas Key Informan dan Informan dalam penelitian Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar berdasarkan jenis kelamin.

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Pria	2	45%
2.	Wanita	4	55%

Jumlah	6	100%
---------------	---	-------------

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui key informan dan informan penelitian yang terdiri dari Pendamping PKH, Operator PKH Kabupaten Kampar, keluarga penerima manfaat PKH, serta masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan PKH di Kelurahan Batu Bersurat berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 2 orang berjenis kelamin laki-laki dengan persentase 45%, dan 4 orang berjenis kelamin perempuan dengan persentase 55%.

3. Tingkat Pendidikan

Dalam sebuah penelitian tanggapan yang diberikan informan tidaklah sama persis, hal ini dikarenakan berbedanya tingkat pemahaman informan terhadap masalah yang ada di dalam penelitian, dan perbedaan pemahaman tersebut dipengaruhi oleh pendidikan yang didapatkan oleh masing-masing informan tersebut.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan di kelurahan batu bersurat, dapat dilihat tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel V. 4 : identitas Key Informan dan Informan dalam penelitian Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar berdasarkan tingkat pendidikan.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Sekolah Dasar	2	35%
2.	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	15%

3.	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1	15%
4.	Diploma III (D3)	-	
5.	Strata I (SI)	2	35%
Jumlah		6	100%

Sumber : Data Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa key informan dan informan penelitian yang terdiri dari Pendamping PKH, Operator PKH Kabupaten Kampar, keluarga penerima manfaat PKH, serta masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan PKH di Kelurahan Batu Bersurat berdasarkan jenjang pendidikan yaitu sebanyak 2 orang berpendidikan SD dengan persentase 35%, 1 orang berpendidikan SMP dengan persentase 15%, 1 orang berpendidikan SMA dengan persentase 15%, dan 2 orang berpendidikan S1 dengan persentase 35%.

B. Tanggapan Responden mengenai Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

Menurut Efektivitas Ravianto (dalam Masruri, 2014:11) efektivitas ialah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif

Untuk dapat mengetahui Efektivitas Program Keluarga Harapan Dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar dapat dilihat dari beberapa indikator penelitian dibawah ini :

1. Pemahaman Program

Pemahaman program merupakan sejauh mana masyarakat dan pengelola program keluarga harapan mengetahui dan memahami tentang program ini. Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (PKH) diharapkan dapat memahami program ini dengan baik, persyaratan yang harus diikuti maupun ketentuan penggunaan dana bantuan yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Gusrimardy, S.Sos pada hari senin 19 juli 2021 pukul 13.30 WIB di Kantor Lurah beliau selaku pendamping PKH di Kecamatan XIII Koto Kampar mengenai pemahaman masyarakat terhadap program keluarga harapan yang dilaksanakan di kelurahan batu bersurat, yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

Menurut saya masyarakat di kelurahan batu bersurat ada yang mengerti tentang program keluarga harapan ini, dan ada juga yang kurang mengerti, contohnya saja seperti persyaratan yang harus dilakukan oleh keluarga penerima manfaat pkh yang terdiri dari persyaratan pendidikan kesehatan maupun kesejahteraan sosial, dari segi pendidikan seharusnya masyarakat yang mempunyai anak usia sekolah harus menyekolahkan anaknya dan melaporkannya kepada petugas, namun ada yang tidak melaporkan anaknya, yang mana keluarga penerima manfaat lain yang melaporkan, kemudian dari segi kesehatan sudah banyak keluarga penerima manfaat seperti ibu hamil dan balita yang memeriksakan diri ke puskesmas terdekat, namun ada juga yang tidak memeriksakan diri dikarenakan malas. Kemudian dari segi kesejahteraan sosial tidak terdapat lansia dan disabilitas yang terdaftar dalam program keluarga harapan ini. Selanjutnya tentang uang yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat program keluarga harapan bisa dilihat digunakan masyarakat dengan baik, yakni digunakan untuk melengkapi peralatan sekolah anaknya, dan juga untuk kebutuhan sehari-hari, namun ada juga masyarakat yang menggunakan uang dari bantuan ini untuk membeli hal lain seperti baju baru ataupun barang yang tidak terlalu di butuhkan olehnya”.

Dari pernyataan key informan diatas, dapat dilihat bahwa masyarakat sudah mengerti tentang program keluarga harapan ini. Selanjutnya tentang

sosialisasi yang dilaksanakan oleh pendamping program keluarga harapan kepada keluarga penerima manfaat, bapak Gusrimardy S.Sos memberikan tanggapan sebagai berikut :

“Sosialisasi selalu dilakukan setiap bulan kepada keluarga penerima manfaat PKH, yang mana didalam pertemuan tersebut dilakukan sosialisasi agar masyarakat yang dikategorikan miskin yang terdaftar dalam keluarga penerima manfaat PKH ini bisa mengembangkan kemampuannya untuk membuka usaha agar tidak lagi terjerat dalam masalah kemiskinan dan bisa keluar dari program ini, serta agar masyarakat miskin lain yang tidak terdaftar juga bisa merasakan manfaat dari program ini”.

Dari wawancara peneliti dengan key informan tersebut sosialisasi telah dilakukan dengan baik oleh pendamping PKH kepada keluarga penerima manfaat. Kemudian tentang apakah program keluarga harapan ini dapat diterima dilingkungan masyarakat bapak Gusrimardy, S.Sos menjelaskan melalui wawancara dibawah ini :

“Ya tentu saja program ini sangat dapat diterima dengan baik oleh masyarakat di kelurahan batu bersurat, karena memberikan keuntungan berupa uang yang bisa digunakan oleh keluarga penerima manfaat sesuai dengan kebutuhannya”.

Dari pernyataan key informan , program keluarga harapan ini sangat diterima dengan baik oleh masyarakat karena memberika keuntungan dan tidak merugikan sama sekali. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan operator administrasi pangkalan data program keluarga harapan yakni Bapak Zamzaris S.Ikom di Kantor Sekretariat PPKH pada hari kamis 29 juli 2021 Pukul 11.45 WIB mengenai pemahaman masyarakat terhadap program keluarga harapan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya ada yang paham dan tidak, yang tidak paham itu biasanya seperti hanya tau mendapat bantuan uang dari pemerintah saja, dibelanjakan untuk membeli barang yang diinginkan dan tidak bisa menggunakan uang itu

dengan baik agar bisa menghasilkan uang lagi dan bisa memperbaiki ekonomi keluarganya, namun ada juga yang paham tentang program ini dan menggunakan uang bantuan ini dengan baik untuk memenuhi kebutuhannya”.

Dari pernyataan informan, masyarakat cukup mengetahui dan memahami program keluarga harapan (PKH) ini. Sedangkan tentang pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat bapak Zamzaris, S.Ikom memberikan tanggapan sebagai berikut :

“Pelaksanaan sosialisasi pasti ada dilaksanakan kepada masyarakat, biasanya sosialisasi dilakukan oleh pendamping PKH yang bertanggung jawab atas desa maupun kelurahan itu, namun kendalanya kadang ada kepala desa yang support da nada yang tidak”.

Dari pernyataan informan, sosialisasi sudah dilakukan di lingkungan masyarakat yang terdaftar kedalam keluarga penerima manfaat PKH. Selanjutnya tentang apakah program dapat diterima di lingkungan masyarakat bapak Zamzaris S.Ikom menjelaskan bahwa :

“Di lingkungan masyarakat, saya lihat masyarakat bahagia sekali mendengar adanya bantuan PKH ini, walaupun masih ada masyarakat yang kecewa karena tidak mendapatkan bantuan”.

Dari pernyataan informan, bantuan PKH ini diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ita Herlina pada hari sabtu 3 juli 2021 Pukul 10.00 WIB beliau selaku keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mengenai pemahaman masyarakat terhadap program keluarga harapan, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“Untuk saya pribadi cukup mengetahui tentang program ini, apa kegunaan dan persyaratan yang harus dilakukan, karena saya juga cukup aktif didalam kegiatan masyarakat.

Dari pernyataan informan, karena dia cukup aktif di lingkungan masyarakat, maka dia sangat mengetahui tentang program keluarga harapan ini.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan sosialisasi program yang dilakukan kepada masyarakat ibu Ita Herlina memberikan tanggapan :

“ Sejauh yang saya rasakan sosialisasi selalu diadakan per tiga bulan oleh pendamping PKH untuk melakukan pertemuan peningkatan kemampuan keluarga (P2K2), yang mana didalam pertemuan ini membahas tentang apakah sudah ada kemajuan didalam perekonomian masing-masing kpm dan apakah kpm sudah bisa mempunyai usaha dengan adanya bantuan program ini”.

Dari pernyataan informan, sosialisasi dilakukan di lingkungan masyarakat yang terdaftar dalam KPM PKH. Kemudian tentang apakah pelaksanaan program dapat diterima dilingkungan masyarakat, Ibu Ita Herlina memberikan penjelasan sebagai berikut :

“ Ini tidak perlu dipertanyakan lagi menurut saya, sudah jelas tentu saja saya merasa senang dengan adanya bantuan ini, karna bisa membantu perekonomian keluarga”.

Dari pernyataan informan, masyarakat menerima dengan baik bantuan PKH ini. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Asni pada hari Sabtu 3 juli 2021 pukul 11.00 WIB beliau selaku keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mengenai pemahaman masyarakat terhadap program keluarga harapan, yang hasil wawancaranya sebagai berikut :

“ Yang saya tau PKH ini memberikan bantuan uang kepada masyarakat, yang biasanya diambil di atm atau brilink”.

Dari pernyataan informan, uang PKH dapat diambil di bank terdekat.

Selanjutnya mengenai pelaksanaan sosialisasi program yang dilakukan kepada masyarakat ibu Nur Asni memberikan tanggapan :

“Sosialisasi ada dilakukan oleh pendamping PKH, waktu sosialis yang dibahas itu tentang pencairan dana, laporan sekolah anak, kemudian ada pengurangan anak atau tambahan, saya kadang tidak hadir waktu sosialisasi, karena berjualan jadi tidak sempat ”.

Dari pernyataan informan, pada saat pelaksanaan kegiatan sosialisasi hal yang dibahas adalah tentang hal yang berkaitan dengan PKH. Kemudian tentang apakah pelaksanaan program dapat diterima dilingkungan masyarakat, Ibu Nur Asni memberikan penjelasan sebagai berikut :

“Jelas diterima, mana ada masyarakat yang menolak uang dari pemerintah, uangnya berguna untuk menambah biaya makan”.

Dari pernyataan informan, PKH dapat diterima dilingkungan masyarakat karena membantu mencukupi kebutuhan akan pangan. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Atika pada hari Minggu 4 juli 2021 pukul 11.30 WIB beliau selaku masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH mengenai pemahaman masyarakat terhadap program keluarga harapan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“ Saya tau Program Keluarga Harapan ini ada, tetapi untuk syarat-syarat atau kewajiban yang harus dilakukan saya tidak tahu, karena saya kan tidak mendapat bantuan ini, yang saya tau hanya program ini memberikan bantuan berupa uang kepada masyarakat”.

Dari pernyataan informan, masyarakat tahu adanya tentang program ini, tetapi tidak secara rinci. Selanjutnya mengenai pelaksanaan sosialisasi program yang dilakukan kepada masyarakat ibu Nur Atika memberikan tanggapan:

“ Saya tidak mendapatkan bantuan PKH ini, jadi saya tidak tau tentang pelaksanaan sosialisasi ini, biasanya sosialisasi itu dilaksanakan hanya untuk keluarga penerima manfaat (KPM) PKH saja, dan tidak ada sosialisasi yang dilaksanakan untuk masyarakat yang tidak terdaftar sebagai KPM PKH seperti saya ini”.

Dari pernyataan informan, sosialisasi tentang program keluarga harapan hanya dilaksanakan untuk keluarga penerima manfaat PKH saja. Kemudian

mengenai apakah pelaksanaan program dapat diterima dilingkungan masyarakat ibu Nur Atika menjelaskan :

“ Bantuan ini tentu saja sangat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat, apalagi bantuan ini sangat membantu perekonomian masyarakat miskin seperti saya ini, tapi sayangnya saya tidak terdaftar kedalam bantuan tersebut”.

Dari pernyataan informan diatas, dapat dimengerti bahwa program keluarga harapan ini sangat diterima dengan baik di lingkungan masyarakat kelurahan Batu Bersurat. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nurina pada hari Minggu 4 Juli 2021 Pukul 14.00 beliau selaku masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH mengenai pemahaman masyarakat terhadap program keluarga harapan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“ Saya tau PKH, biasanya penerimaan uang per tiga bulan, banyak yang dapat, terkadang ada yang dapat sampai tiga juta”.

Dari pernyataan informan PKH merupakan bantuan yang memberikan manfaat berupa uang kepada masyarakat miskin. Selanjutnya mengenai pelaksanaan sosialisasi program yang dilakukan kepada masyarakat ibu Nurina memberikan tanggapan:

“ Kurang tau juga, saya tidak pernah dapat bantuan pemerintah sekalipun”.

Dari pernyataan informan, masyarakat miskin yang tidak mendapat bantuan PKH kurang mengetahui tentang pelaksanaan sosialisasi. Kemudian mengenai apakah pelaksanaan program dapat diterima dilingkungan masyarakat ibu Nurina menjelaskan :

“Kalau saya mendapat bantuan ini pasti senang sekali, soalnya uang ini membantu, apalagi usia saya sekarang ini tidak bisa kerja, mungkin belum rezeki”.

Dari pernyataan informan Program Keluarga Harapan (PKH) diterima dengan baik di lingkungan masyarakat. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan dengan key informan dan informan dapat disimpulkan mengenai indikator pemahaman program masyarakat terhadap bantuan program keluarga harapan adalah masyarakat cukup paham dengan bantuan ini, dan sosialisasi dilakukan di ruang lingkup masyarakat yang terdaftar kedalam keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, dan juga program ini diterima dengan sangat baik oleh masyarakat kelurahan Batu Bersurat karena membantu perekonomian keluarga yang tergolong miskin.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di kelurahan Batu Bersurat, peneliti melihat indikator pemahaman program masyarakat terhadap bantuan program keluarga harapan dapat dilihat bahwa masyarakat tahu tentang Program Keluarag Harapan (PKH) ini, rata rata KPM mengerti secara rinci program ini banub tidak dapat dipungkiri masih ada masyarakat yang belum cukup mengerti, kemudian sosialisasi dilaksanakan di lingkungan keluarga penerima manfaat (KPM) PKH, masyarakat juga antusias dalam mengikuti sosialisasi ini karena membantu keluarga untuk menumbuhkan motivasi diri untuk lebih kreatif dalam meningkatkan perekonomian dengan salah satu caranya adalah berjualan. Karena pada dasarnya program ini ditujukan untuk meningkatkan perekonomian, memberikan pendidikan, dan juga agar kesehatan masyarakat yang tergolong miskin dapat terjaga. Namun sosialisasi ini tidak dilaksanakan di semua

lingkungan masyarakat, sehingga menimbulkan dampak masyarakat miskin lainnya tidak dapat mendaftarkan diri untuk mendapatkan bantuan, karena masyarakat hanya didaftarkan melalui data yang ada di kelurahan, sedangkan data yang ada di kelurahan tersebut kurang lengkap, atau masih ada yang tidak terdaftar di kelurahan. Kemudian jika dilihat dari sub indikator yang kedua yaitu apakah program ini dapat diterima di lingkungan masyarakat dapat dicermati bahwa program ini sangat diterima dengan baik oleh masyarakat karena membawa ke perubahan yang lebih baik terhadap perekonomian, pendidikan, maupun kesehatan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan pada indikator pemahaman program, beberapa masyarakat masih kurang mengerti tentang bantuan ini karena tidak terdaftar kedalam program ataupun terdaftar kedalam program tetapi kurang menyerap informasi tentang program ini serta tidak aktif didalam sosialisasi dan pelaksanaan sosialisasi program hanya dilaksanakan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) PKH saja dan dilakukan setiap bulan, dan masyarakat miskin yang tidak terdaftar dalam program ini tidak tahu cara mendaftarkan diri karena tidak pernah dilaksanakan sosialisasi kepada mereka, kemudian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dapat diterima oleh semua masyarakat.

2. Tepat Sasaran

Penentuan sasaran yang tepat baik yang ditetapkan secara individu maupun secara organisasi sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaliknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat, maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Gusrimardy, S.Sos pada hari Senin 19 Juli 2021 pukul 13.30 WIB di Kantor Lurah beliau selaku Pendamping PKH di Kecamatan XIII Koto Kampar mengenai tepat sasaran atau tidak program ini di lingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“ Tujuan program keluarga harapan ini untuk membantu masyarakat miskin dalam perkonomian kesehatan dan juga pendidikan, menurut saya hal ini sangat tepat sasaran karena masyarakat yang mendapat bantuan ini memang tergolong miskin, namun masih banyak juga sebenarnya masyarakat miskin yang belum mendapat bantuan ini”.

Dari pernyataan key informan, sasaran penerima bantuan program keluarga harapan ini sudah tepat sasaran. Sedangkan tentang apakah program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat bapak Gusrimardy, S.Sos memberikan tanggapan sebagai berikut :

“ Bantuan ini memberikan bantuan uang kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan (PKH), nah bantuan tersebut digunakan untuk kepentingan dari berbagai keluarga, jika di keluarga nya ada anak usia sekolah maka bantuan itu digunakan untuk pendidikan anak tersebut, contohnya untuk membeli seragam, alat tulis, buku sekolah dan hal lain yang dibutuhkan. Kemudian jika dikeluarganya ada ibu hamil dan balita maka uang tersebut digunakan untuk membantu kesehatannya seperti membeli susu, vitamin dan lainnya. Dan apabila dikeluarganya ada lansia maupun disabilitas maka uang tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan hariannya karena sudah tidak mampu bekerja”.

Dari pernyataan key informan, program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan operator administrasi pangkalan data program keluarga harapan yakni Bapak Zamzaris S.Ikom di Kantor Sekretariat PPKH pada hari Kamis 29 Juli Pukul 11.45 WIB mengenai tepat sasaran atau tidak program ini di lingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya ada yang tepat sasaran dan tidak, tepat sarasannya ya yang mendapat bantuan memang masyarakat miskin, yang tidak tepat sasaran itu masyarakat yang tergolong mampu tapi dapat bantuan, data untuk mendaftarkan masyarakat kan dari dinas sosial jadi mungkin karena tidak dicek satu persatu dilapangan makanya ada yang tidak tepat sasaran”.

Dari pernyataan informan, program ini ada yang tepat sasaran dan ada yang tidak. Sedangkan tentang apakah program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat bapak Zamzaris S.Ikom memberikan tanggapan :

“Kegiatan dalam program ini sangat bagus sekali, dikarenakan kalau terdaftar dalam program ini dan di dalam keluarga terdapat anak sekolah maka orang tua wajib menyekolahkan anaknya, jika ada ibu hamil, balita maupun disabilitas dan lanjut usia maka wajib memeriksakan kesehatannya, jadi nggak ada lagi itu anak yang tidak sekolah dan anggota keluarga yang sakit-sakitan”.

Dari pernyataan informan, bantuan ini sangat bermanfaat. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ita Herlina pada hari Sabtu 3 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB beliau selaku keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mengenai mengenai tepat sasaran atau tidak program ini di lingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Menurut saya tepat sasaran, yang dapat bantuan memang masyarakat yang miskin, dulu ada masyarakat mampu yang dapat bantuan, tapi sekarang sudah dikeluarkan dan ada yang mengundurkan diri”.

Dari pernyataan informan, bantuan program keluarga harapan ini sudah sesuai dengan target sasaran. Sedangkan tentang apakah program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat ibu Ita Herlina memberikan tanggapan :

“Saya pribadi sangat terbantu sekali ya, karena saya memang butuh sekali program ini, uangnya ini saya gunakan untuk membeli perlengkapan sekolah untuk anak saya yang sekolah”.

Dari pernyataan informan, program ini sangat membantu memenuhi kebutuhan yang diperlukan oleh keluarga penerima manfaat program keluarga harapan. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Asni pada hari Sabtu 3 Juli 2021 Pukul 11.00 beliau selaku keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mengenai mengenai tepat sasaran atau tidak program ini di lingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tidak tepat sasaran, yang dapat banyak yang sudah mampu, yang parahnya yang punya mobil juga dapat bantuan”.

Dari pernyataan informan, penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini tidak tepat sasaran. Sedangkan tentang apakah program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat ibu Nur Asni memberikan tanggapan :

“PKH ini menurut saya memang mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat miskin, contohnya dikasih uang, kemudian kesehatan dan pendidikan juga diperhatikan”.

Dari pernyataan informan, Program Keluarga Harapan mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Atika pada hari Minggu 4 Juli 2021 Pukul 11.30 WIB beliau selaku masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH mengenai tepat sasaran atau tidaknya program ini di lingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kurang tepat sasaran menurut saya, saya lihat masyarakat yang dapat bantuan itu ada yang sudah mampu, rumahnya besar, perhiasan emasnya juga banyak, dan punya kendaraan lebih dari satu”.

Dari pernyataan informan, sasaran dalam program ini belum sesuai target. Sedangkan tentang apakah program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat ibu Nur Atika memberikan tanggapan :

“Sesuai yang dibutuhkan masyarakat sekali, yang tidak sekolah karena tidak punya biaya membeli seragam jadi bisa sekolah, periksa kesehatan dan minta obat ke puskesmas juga tidak bayar jadinya”.

Dari pernyataan informan diatas, program ini sangat bagus dalam membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nurina pada hari Minggu 4 Juli 2021 Pukul 14.00 beliau selaku masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH mengenai tepat sasaran atau tidaknya program ini di lingkungan masyarakat, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Masih banyak yang belum dapat, saya saja contohnya, tidak pernah dapat bantuan apapun dari pemerintah, anak saya yang punya satu anak usia dini dan satu balita juga tidak dapat bantuan ini, tapi dari segi syarat sebenarnya sudah memenuhi untuk dapat bantuan ini”.

Dari pernyataan informan, masih banyak masyarakat miskin yang belum pernah mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini. Sedangkan tentang apakah program ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan masyarakat ibu Nurina memberikan tanggapan :

“Banyak yang ingin dapat bantuan PKH ini karena memang sangat berguna dan banyak sekali manfaatnya di lingkungan masyarakat”.

Dari pernyataan informan, Program Keluarga Harapan memberikan keuntungan yang sangat banyak dalam lingkungan masyarakat. Jadi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan dapat dilihat dari indikator tepat sarannya program ini, program ini dibuat agar diperuntukkan

untuk masyarakat miskin yang memenuhi indikator kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan sosial dengan adanya data masyarakat miskin yang didapatkan dari kelurahan maka masyarakat miskin bisa terdaftar kedalam program keluarga harapan ini, walaupun masih banyak sekali yang belum terdaftar dikarenakan kuota untuk mendapatkan bantuan ini tidak banyak, dan bantuan ini mengedepankan prioritas yang dibutuhkan oleh masyarakat dimana membantu agar masyarakat bisa mendapatkan pelayanan yang baik dari pemerintah dalam segi pendidikan maupun kesehatan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Batu Bersurat, peneliti melihat dari indikator tepat sasaran atau tidak program ini di lingkungan masyarakat dapat dilihat bahwa yang menerima bantuan keluarga harapan di Kelurahan Batu Bersurat kurang tepat sasaran karena banyak masyarakat yang terbilang mampu mendapat bantuan ini, dan juga masih banyak sekali masyarakat yang benar benar miskin yang tidak mendapatkan bantuan, namun pemerintah sudah melakukan tugasnya dengan baik karena mendapatkan data dari kelurahan yang mana kelurahan lah yang paling mengerti dengan kondisi masyarakatnya, dan bantuan yang diberikan ini sangat membantu perekonomian kesehatan serta pendidikan masyarakat di Kelurahan Batu Bersurat.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pada indikator tepat sasaran, pihak dinas sosial telah melaksanakan tugas dengan baik, karena menetapkan sasaran sesuai dengan data yang diberikan oleh kelurahan, namun dilapangan saat ini masih ada yang tidak tepat sasaran, yang mana jumlah masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Batu Bersurat berjumlah 402 KK sedangkan yang mendapatkan

bantuan hanya 155 KK, seharusnya pihak dinas sosial turun kelapangan dan meninjau keluarga penerima manfaat dengan teliti.

3. Tepat waktu

Tepat waktu merupakan sesuatu yang dapat menentukan keberhasilan sesuatu kegiatan yang dilakukan dalam sebuah organisasi tapi juga dapat berakibat terhadap kegagalan suatu aktivitas organisasi. Penggunaan waktu yang tepat akan menciptakan efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Gusrimardy, S.Sos pada hari senin 19 Juli 2021 pukul 13.30 WIB di Kantor Lurah beliau selaku Pendamping PKH di Kecamatan XIII Koto Kampar mengenai apakah kegiatan yang dilakukan pengurus bantuan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Saya sebagai pendamping program keluarga harapan di Kecamatan XIII Koto Kampar selalu memberikan informasi yang akurat kepada masyarakat, baik itu tentang waktu pelaksanaan sosialisasi maupun tentang waktu pencairan dana program keluarga harapan ini, biasanya saya sampaikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang memang aktif di dalam kegiatan dengan cara pergi langsung kerumahnya atau di informasikan melalui telepon atau sms, kemudian keluarga inilah yang akan menyebarkan informasi ini kepada keluarga lain”.

Dari pernyataan key informan, pengurus program keluarga harapan sudah melakukan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Sedangkan tentang apakah pencairan dana program keluarga harapan terealisasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Bapak Gusrimardy, S.Sos memberikan jawaban sebagai berikut :

“Jadwal pencairan dana PKH ini kan dilakukan per tiga bulan, besarnya itu sesuai dengan ketentuan, menurut saya sudah tepat waktu, namun kadang dibilang terlambat oleh masyarakat karena masyarakat kurang menyerap informasi dengan baik, yang seharusnya jadwal pencairannya hari rabu tapi mereka mengira pencairannya hari selasa, pada tahun 2020 dikarenakan adanya covid-19 maka pencairan dana pada bulan januari sampai dengan juni dilakukan tiap bulan, sedangkan pada bulan juli sampai dengan desember dilakukan per tiga bulan, biasanya keterlambatan itu juga disebabkan oleh uang dari pemerintah pusat belum masuk ke rekening KPM dan juga kadang karena sistem eror”.

Dari pernyataan key informan, waktu pencairan dana program keluarga harapan sudah terealisasikan dengan baik, namun masih ditemukan kendala keterlambatan yang disebabkan oleh masyarakat itu sendiri. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan operator administrasi pangkalan data program keluarga harapan yakni Bapak Zamzaris S.Ikom di Kantor Sekretariat PPKH pada hari Kamis 29 Juli 2021 Pukul 11.45 WIB mengenai apakah kegiatan yang dilakukan pengurus bantuan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kegiatan yang dilaksanakan dalam program keluarga harapan itu dilaksanakan oleh pendamping PKH yang ada disetiap desa ataupun kelurahan, menurut saya pendamping sudah melaksanakan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan waktu yang seharusnya, baik itu pelaksanaan sosialisasi maupun yang lainnya, karena saya dikabupaten saya kurang tahu secara lengkap kegiatan yang dilakukan oleh masing masing pendamping PKH, tetapi menurut saya sudah sangat baik”.

Dari pernyataan informan pengurus program keluarga harapan sudah melakukan tugasnya dengan baik dan tepat waktu. Sedangkan tentang apakah pencairan dana program keluarga harapan terealisasikan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Bapak Zamzaris, S.Ikom memberikan tanggapan :

“Sudah tepat waktu, tidak ada keterlambatan sama sekali, dari dinas sudah mencairkan dana sesuai dengan waktu yang seharusnya”.

Dari pernyataan informan, pencairan dana program keluarga harapan sudah tepat waktu. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ita Herlina pada hari Sabtu 3 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB beliau selaku keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mengenai mengenai apakah kegiatan yang dilakukan pengurus bantuan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Pendamping program keluarga harapan biasanya menyampaikan informasi lewat salah satu KPM, kemudian disebarluaskan, saya juga ikut menyebarkan informasi juga kepada KPM lain, kerja pengurus PKH sudah sangat baik menurut saya, orang nya juga ramah”.

Dari pernyataan informan, informasi yang diberikan oleh pengurus PKH sudah akurat. Sedangkan tentang apakah pencairan dana program keluarga harapan terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Ibu Ita Herlina memberikan tanggapan :

“Biasanya tepat waktu kadang telat juga, kenapa terlambat saya juga tidak tau alasannya, kemarin ada selama 6 bulan uang pkh disalurkan perbulan, terus bulan selanjutnya disalurkan per tiga bulan lagi.

Dari pernyataan informan, pencairan dana program keluarga harapan itu tepat waktu namun terkadang juga terlambat. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Asni pada hari Sabtu 3 Juli 2021 Pukul 11.00 WIB beliau selaku keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mengenai mengenai apakah kegiatan yang dilakukan pengurus bantuan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kalau kegiatan sosialisasi dilakukan per tiga bulan, seharusnya kan perbulan, mungkin untuk menghemat waktu dan susah mengumpulkan KPM jadi dilakukan per tiga bulan”.

Dari pernyataan informan, pengurus belum melaksanakan sosialisasi sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Sedangkan tentang apakah pencairan dana program keluarga harapan terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Ibu Nur Asni memberikan tanggapan :

“Sering telat menurut saya, mungkin karena saya tidak langsung diberi tahu oleh pendamping mungkin ya, yang memberi tahu saya KPM lain biasanya”.

Dari pernyataan informan, pencairan dan Program Keluarga Harapan sering tidak tepat waktu. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Atika pada hari Minggu 4 Juli 2021 Pukul 11.30 WIB beliau selaku masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH mengenai apakah kegiatan yang dilakukan pengurus bantuan Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Kurang tau juga ya, karena saya tidak dapat bantuan PKH, tapi saya lihat ada pertemuan setiap bulan yang dilakukan oleh keluarga penerima manfaat PKH”.

Dari pernyataan informan, pertemuan keluarga yang diselenggarakan oleh pengurus PKH dilakukan dengan rutin. Sedangkan tentang apakah pencairan dana program keluarga harapan terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan Ibu Nur Atika memberikan tanggapan :

“Kemarin saya dengar uang PKH telat dicairkan, yang seharusnya bulan ini tapi akhirnya cair bulan depan, telatnya karena apa saya kurang tau”.

Dari pernyataan informan, pencairan dana program keluarga harapan mengalami keterlambatan. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nurina pada hari Minggu 4 Juli 2021 Pukul 14.00 WIB beliau selaku

masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH mengenai apakah pencairan dana program keluarga harapan terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Yang saya lihat masyarakat yang dapat PKH rutin mendapat uang per tiga bulan, jumlahnya bervariasi, ada yang dapat 600 ribu, 2 juta, dan lain lain”.

Dari pernyataan informan pencairan dana Program Keluarga Harapan sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jadi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan dapat dilihat dari indikator tepat waktu, yaitu pengurus Program Keluarga Harapan (PKH) sudah melakukan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, baik tentang waktu pencairan dana PKH maupun tentang waktu pelaksanaan sosialisasi yang akan diberikan kepada masing masing keluarga penerima manfaat, sedangkan untuk jadwal pencairan dana PKH itu sudah tepat waktu, namun terlambat dikarenakan kurangnya pemahaman informasi di lingkungan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) itu sendiri.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Batu Bersurat, peneliti melihat dari indikator tepat sasaran, pendamping PKH melakukan tugas dengan baik, menyampaikan informasi langsung kepada salah satu Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dan juga melaksanakan sosialisasi rutin setiap bulan agar membantu KPM meningkatkan taraf kualitas hidupnya. Dan tentang apakah pencairan dana PKH terealisasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan dapat dilihat bahwa jadwal pencairan dana dilakukan pertiga bulan, namun pada tahun 2020 dikarenakan adanya covid-19 dana PKH pada

bulan januari sampai dengan juni disalurkan setiap bulan agar membantu perekonomian keluarga yang terkena dampak covid-19 ini, baik keluarga yang berhenti bekerja atau pun keluarga yang bekerja namun gajinya tidak penuh atau dipotong karena dampak covid-19. Kemudian mengenai alasan keterlambatan pencairan dana PKH ini disebabkan oleh kesalahan sistem dan uang yang diberikan pemerintah pusat belum masuk ke rekening KPM serta kurangnya pemahaman informasi dari Keluarga Penerima Manfaat (KPM) karena informasi tidak disampaikan secara langsung dan hanya dari mulut ke mulut, sehingga menyebabkan informasi yang salah, dan juga keterlambatan dikarenakan oleh KPM yang terlambat mengambil uangnya dikarenakan sibuk atau tidak berada di rumah pada saat pencairan dana tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pada indikator tepat waktu, pihak pengurus program keluarga harapan sudah melakukan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan pencairan dana PKH terkadang belum terealisasi tepat waktu yang mana seharusnya dicairkan pada bulan april namun baru bisa dicairkan bulan mei dikarenakan uang yang diberikan pemerintah pusat belum masuk ke rekening KPM dan juga karena kesalahan sistem. Kemudian informasi kurang diterima dengan baik oleh KPM dikarenakan hanya disampaikan melalui mulut ke mulut, yang seharusnya cara yang efektif adalah menyampaikan langsung informasi kepada masing masing KPM melalui grup whatsapp, yang tidak akan menyebabkan adanya informasi yang salah.

4. Tercapainya Tujuan

Tercapainya tujuan merupakan bagaimana agar program yang telah dilaksanakan dapat mengatasi permasalahan yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang telah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Gusrimardy, S.Sos pada hari senin 19 Juli 2021 Pukul 13.30 WIB di Kantor Lurah beliau selaku Pendamping PKH di Kecamatan XIII Koto Kampar mengenai apakah tujuan dari program keluarga harapan telah tercapai, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tujuan utama terbentuknya program keluarga harapan ini kan untuk membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya, juga agar masyarakat dengan mudah mendapatkan akses dibidang kesehatan dan pendidikan yang tersedia. Dan program ini jugamencangkup penyandang disabilitas dan lanjut usia agar mempertahankan kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI, saya lihat di Kelurahan Batu Bersurat tujuan ini sudah tercapai, yang mana dapat dilihat dengan adanya program ini jumlah masyarakat miskin dapat berkurang dan juga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan kesehatan maupun pendidikan, kemudian dengan adanya program ini masyarakat juga sudah bisa meningkatkan kualitas hidupnya dengan cara uang yang diberikan digunakan untuk berjualan, beternak, ataupun berkebun”.

Dari pernyataan key informan, tujuan program keluarga harapan sudah tercapai. Sedangkan apakah ada pengawasan dari pihak dinas sosial terhadap pelaksanaan program keluarga harapan agar tujuan dari program dapat tercapai bapak Gusrimardy, S.Sos memberikan jawaban :

“Tentu saja ada, pihak dinas sosial memastikan agar pelaksanaan PKH berjalan sesuai dengan rencana, melakukan pemantauan kegiatan PKH, dan menangani pengaduan masyarakat juga menyelesaikan masalah yang timbul didalam pelaksanaan PKH”.

Dari pernyataan key informan, adanya pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas sosial. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan operator

administrasi pangkalan data program keluarga harapan yakni Bapak Zamzaris, S.Ikom di Kantor Sekretariat PPKH pada hari Kamis 29 Juli 2021 Pukul 11.45 WIB mengenai apakah tujuan program keluarga harapan telah tercapai, yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“Tujuan nya sudah tercapai sekali, masyarakat miskin sudah banyak yang sejahtera dengan adanya bantuan ini, angka kemiskinan dan anak yang tidak sekolah juga menurun, kesehatan masyarakat juga sangat terjaga jadinya”.

Dari pernyataan informan, keluarga miskin sudah lebih sejahtera dengan adanya bantuan ini. Sedangkan mengenai apakah ada pengawasan dari pihak dinas sosial terhadap pelaksanaan program keluarga harapan agar tujuan dapat tercapai Bapak Zamzaris, S.Ikom memberikan tanggapan :

“Ada, pihak dinas sosial biasanya turun ke lapangan, langsung ke keluarga penerima manfaat (KPM) untuk meninjau perekonomian atau mendengarkan keluhan keluhan dari KPM tersebut, kadang juga ke kecamatan saja pengawasannya”.

Dari pernyataan informan, pengawasan dilakukan dengan langsung turun ke lapangan. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ita Herlina pada hari Sabtu 3 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB beliau selaku keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mengenai mengenai apakah tujuan program keluarga harapan telah tercapai, yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“Tercapai, KPM lebih sejahtera, contohnya saja baju atau tas anak anak dari KPM yang sebelumnya sobek sobek sudah bisa diganti dengan yang baru berkat uang yang diberikan, anak anak yang sakit sakitan juga bisa sehat berkat adanya akses kesehatan yang gratis, ibu hamil juga bisa memeriksakan dirinya dan diberikan susu atau vitamin agar anaknya tidak mengalami kecatatan”.

Dari pernyataan informan kehidupan masyarakat pasca adanya bantuan ini menjadi lebih baik. Sedangkan mengenai apakah ada pengawasan dari pihak dinas

sosial terhadap pelaksanaan program keluarga harapan agar tujuan dapat tercapai

Ibu Ita Herlina memberikan tanggapan :

“Ada, tapi jarang langsung turun kelapangan, mungkin hanya sampai ke pendamping PKH saja, kalau langsung memeriksa langsung ke KPM hanya sesekali”.

Dari pernyataan informan, pengawasan dilakukan oleh pihak dinas sosial, tetapi jarang. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Asni pada hari Sabtu 3 Juli 2021 Pukul 11.00 WIB beliau selaku keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mengenai apakah tujuan program keluarga harapan telah tercapai, yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“Bagi saya pribadi tercapai, karena membantu saya dalam meningkatkan pendapatan dengan berjualan, jadi saya bisa memenuhi pengeluaran saya, apalagi kan anak saya sudah ada yang kuliah, pengeluaran menjadi lebih banyak”.

Dari pernyataan informan, tujuan program keluarga harapan sudah tercapai dengan membantu masyarakat berjualan dengan uang yang diberikan. Sedangkan mengenai apakah ada pengawasan dari pihak dinas sosial terhadap pelaksanaan program keluarga harapan agar tujuan dapat tercapai Ibu Nur Asni memberikan tanggapan :

“Ada, tapi kalau survey langsung ke Keluarga Penerima Manfaat khususnya saya tidak ada, biasanya survey di kantor camat saja, KPM disuruh hadir ke kantor camat kemudian dilaksanakan sosialisasi oleh pihak dinas sosial”.

Dari pernyataan informan, pihak dinas sosial melakukan sosialisasi di kantor camat. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Atika pada hari Minggu 4 Juli 2021 pukul 11.30 WIB beliau selaku masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH mengenai

apakah tujuan program keluarga harapan telah tercapai, yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“Masyarakat yang dapat bantuan PKH saya lihat ekonominya semakin bagus, bisa membuka usaha dan juga mendapat bantuan lain berkat bantuan ini”.

Dari pernyataan informan, tujuan tercapai dilihat dari segi meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Sedangkan mengenai apakah ada pengawasan dari pihak dinas sosial terhadap pelaksanaan program keluarga harapan agar tujuan dapat tercapai Ibu Nur Atika memberikan tanggapan :

“Untuk hal ini saya kurang tau, soalnya saya tidak dapat bantuan, ada yang survey ke lapangan tapi saya tidak tau itu dari dinas sosial atau dari dinas yang lain”.

Dari pernyataan informan, pihak pemerintah melakukan survey ke lapangan. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nurina pada hari Minggu 4 Juli 2021 Pukul 14.00 WIB beliau selaku masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH mengenai apakah tujuan program keluarga harapan telah tercapai, hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Tidak tercapai sepenuhnya, tujuannya kan untuk membantu masyarakat miskin untuk keluar dari garis kemiskinan, tapi kenyataannya masyarakat miskin masih banyak, atau bisa dibilang bertambah”.

Dari pernyataan informan, tujuan Program Keluarga Harapan belum tercapai sepenuhnya. Jadi berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan key informan dan informan dapat dilihat dari indikator tercapainya tujuan dari program keluarga harapan, yaitu tujuan dari pelaksanaan dari program keluarga harapan ini sudah tercapai yang mana sudah banyak masyarakat miskin yang menjadi sejahtera dengan adanya bantuan ini, kemudian pengawasan juga

dilakukan oleh pihak dinas sosial terhadap program ini, yang mana pengawasannya dengan cara turun langsung ke lapangan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Batu Bersurat, peneliti melihat dari indikator tercapainya tujuan terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar dapat dilihat tujuan dari dibentuknya program keluarga harapan sudah tercapai, yang mana tujuannya adalah untuk membantu masyarakat miskin untuk meningkatkan taraf hidupnya, juga agar masyarakat dengan mudah mendapatkan akses dibidang kesehatan dan pendidikan yang tersedia, juga agar penyandang disabilitas dan lanjut usia dapat mempertahankan kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan Nawacita Presiden RI, dengan adanya bantuan ini kehidupan masyarakat menjadi lebih sejahtera, karena dapat menggunakan uang dari bantuan ini untuk memenuhi kebutuhannya atau membangun usaha agar bisa keluar dari garis kemiskinan, dan juga dengan terdaftarnya masyarakat dalam program ini juga membantu untuk mendapatkan bantuan komplementer lainnya. Namun sayangnya peneliti juga melihat bahwa uang yang diberikan bantuan ini tidak digunakan untuk kebutuhan masyarakat seperti membeli beras ataupun peralatan sekolah anaknya tetapi digunakan untuk membeli baju, ataupun hal yang tidak terlalu perlu. Kemudian mengenai apakah ada pengawasan dari dinas sosial terhadap pelaksanaan program keluarga harapan agar tujuan dari program dapat tercapai peneliti melihat bahwa memang ada pengawasan yang dilakukan oleh pihak dinas sosial dengan cara

turun kelapangan langsung kepada keluarga penerima manfaat ataupun ke kecamatan saja.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan pada indikator tercapainya tujuan, bahwa tujuan program keluarga harapan untuk meningkatkan pendidikan serta memelihara kesehatan sudah sangat tercapai namun masih ada masyarakat yang menggunakan uang ini untuk hal yang bersifat tidak kebutuhannya, dan juga masih banyak masyarakat miskin lainnya yang belum terdaftar kedalam program ini, dan mengenai pengawasan dari pihak dinas sosial seharusnya lebih sering melakukan pengawasan agar masyarakat bisa menyampaikan langsung keluhan kesahnya atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini dan bisa mendapatkan titik terang ataupun solusi dari pihak dinas sosial tersebut.

5. Perubahan Nyata

Perubahan nyata merupakan sejauh mana kegiatan dapat memberikan suatu efek atau dampak serta perubahan nyata bagi masyarakat. Dan bagaimana kondisi masyarakat sebelum dan sesudah program ini dilaksanakan.

Berdasarkan Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Gusrimardy, S.Sos pada hari Senin 19 Juli 2021 pukul 13.30 WIB di Kantor Lurah beliau selaku Pendamping PKH di Kecamatan XIII Koto Kampar mengenai apakah program keluarga harapan dapat mengatasi masalah kemiskinan di Kelurahan Batu bersurat, yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“Semenjak adanya program keluarga harapan di Kelurahan Batu Bersurat masalah kemiskinan yang terjadi sudah lumayan teratasi, dan juga bisa dilihat jumlah peserta PKH ini setiap tahunnya juga meningkat yang menandakan bahwa semakin banyak masyarakat miskin yang terdaftar walaupun belum semuanya”.

Dari pernyataan key informan, masalah kemiskinan sudah teratasi dan juga masyarakat miskin sudah banyak terdaftar dalam program keluarga harapan ini. Sedangkan mengenai bagaimanakah cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Bapak Gusrimardy, S.Sos memberikan tanggapan sebagai berikut :

“PKH sendiri sangat memberikan keuntungan kepada keluarga miskin caranya dengan diberikan akses pelayanan sosial kesehatan dan pendidikan, pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap program sosial lainnya yang merupakan program komplementer. Keluarga yang mendapatkan bantuan PKH itu juga harus mendapatkan subsidi BNPT, jaminan sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu, pemberdayaan melalui KUBE, dan lain lain, yang di ibaratkan PKH ini adalah tulang punggung penanggulangan kemiskinan”.

Dari pernyataan key informan, program keluarga harapan merupakan program yang paling efektif untuk mengurangi kemiskinan. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan operator administrasi pangkalan data program keluarga harapan yakni Bapak Zamzaris, S.Ikom di Kantor Sekretariat PPKH pada hari Kamis 29 Juli 2021 Pukul 11.45 WIB mengenai apakah program keluarga harapan dapat mengatasi masalah kemiskinan di Kelurahan Batu bersurat, yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“Sangat berpengaruh sekali, sudah banyak masyarakat miskin jadi sejahtera dan angka kemiskinan juga jadi menurun karna PKH ini”.

Dari pernyataan informan program keluarga harapan dapat mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan mengenai bagaimanakah cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Bapak Zamzaris, S.Ikom memberikan tanggapan :

“Keuntungannya masyarakat bisa dapat akses kesehatan dan pendidikan, bisa membuka usaha juga, bisa buka usaha kan karena bantuan bahan pangan juga dapat kalau terdaftar PKH jadi uang PKH bisa digunakan untuk berjualan atau berkebun”.

Dari pernyataan informan, berkat adanya bantuan program keluarga harapan ini masyarakat bisa membuka usaha. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Ita Herlina pada hari Sabtu 3 Juli 2021 Pukul 10.00 WIB beliau selaku keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mengenai mengenai mengenai apakah program keluarga harapan dapat mengatasi masalah kemiskinan di Kelurahan Batu bersurat, yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“Semenjak ada PKH ekonomi saya sudah jauh lebih membaik dari sebelumnya, karena uang yang didapat saya gunakan untuk modal berjualan di SD”.

Dari pernyataan informan, ekonomi masyarakat menjadi lebih baik setelah adanya bantuan program keluarga harapan ini. Sedangkan mengenai bagaimanakah cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Ibu Ita Herlina memberikan tanggapan :

“Keuntungannya saya bisa menggunakan akses kesehatan secara gratis, minta obat juga gratis, terus saya bisa beli keperluan anak sekolah juga”.

Dari pernyataan informan, PKH mempermudah dalam mengakses pelayanan kesehatan. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Asni pada hari Sabtu 3 Juli 2021 Pukul 11.00 WIB beliau selaku keluarga penerima manfaat (KPM) PKH mengenai apakah program keluarga harapan dapat mengatasi masalah kemiskinan di Kelurahan Batu bersurat, yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“Kemiskinan teratasi, yang biasanya tidak dapat bantuan sekarang sudah dapat karena masuk dalam data baru”.

Dari pernyataan informan, masalah kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat sudah teratasi. Sedangkan mengenai bagaimanakah cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Ibu Nur Asni memberikan tanggapan :

“Kalau ditanya keuntungan yang didapat tentu sangat banyak, seperti dapat uang per tiga bulan yang bisa digunakan untuk berjualan, beternak atau bertani, kemudian anak saya juga dapat bantuan KIP”.

Dari pernyataan informan, dengan terdapatnya masyarakat kedalam bantuan Program Keluarga Harapan juga bisa mendapatkan bantuan lain. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nur Atika pada hari Minggu 4 Juli 2021 Pukul 11.30 WIB beliau selaku masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH mengenai apakah program keluarga harapan dapat mengatasi masalah kemiskinan di Kelurahan Batu bersurat, yang hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut :

“Karena masih banyak yang belum dapat bantuan, kurang dapat mengatasi masalah kemiskinan menurut saya, contohnya saja anak saya sudah dua tapi belum pernah dapat bantuan apapun”.

Dari pernyataan informan, PKH kurang mampu dalam mengatasi masalah kemiskinan. Sedangkan mengenai bagaimanakah cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Ibu Nur Atika memberikan tanggapan :

“Saya lihat cara PKH memberikan keuntungan kepada masyarakat ya dengan memberikan uang, uangnya bebas digunakan untuk apa saja menurut saya”.

Dari pernyataan informan, PKH memberi keuntungan bagi masyarakat melalui uang yang diberikan. Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara dengan Ibu Nurina pada hari Minggu 4 Juli 2021 Pukul 14.00 WIB beliau selaku masyarakat yang dikategorikan miskin tetapi tidak mendapatkan bantuan PKH

mengenai apakah program keluarga harapan dapat mengatasi masalah kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat, yang hasil wawancaranya adalah sebagai berikut :

“Yang saya lihat tidak, tiap tahun penerimanya bantuan PKH bertambah, tandanya kan masyarakat miskin tambah banyak”.

Dari pernyataan informan, masalah kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat belum teratasi, dapat dilihat dari bertambahnya penerima PKH setiap tahun. Sedangkan mengenai bagaimanakah cara program ini memberikan keuntungan bagi masyarakat Ibu Nurina memberikan tanggapan :

“Kalau dapat PKH, bantuan lain juga di dapat, seperti bantuan beras, sembako, KIS, ini kan lumayan sekali membantu masyarakat miskin dan lansia seperti saya ini”.

Dari pernyataan informan, Program Keluarga Harapan membantu dalam mendapatkan bantuan lainnya. Jadi berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan key informan dan informan dapat dilihat dari indikator perubahan nyata yang terjadi dengan adanya bantuan program keluarga harapan, yaitu kehidupan masyarakat menjadi sejahtera setelah mendapat bantuan ini dan akses pelayanan kesehatan menjadi mudah, serta akses pelayanan pendidikan.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kelurahan Batu Bersurat, peneliti melihat dari indikator perubahan nyata terhadap Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Mengatasi Kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar dapat dilihat bahwa program keluarga harapan ini dapat mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi namun tidak sepenuhnya, serta program keluarga harapan sendiri merupakan tulang punggung dari penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan nasional. Apabila terdaftar kedalam program ini

maka juga harus dipastikan bahwa mendapatkan bantuan komplementer seperti subsidi BNPT, Jaminan Sosial KIS, KIP, bantuan Rutilahu, Pemberdayaan melalui KUBE termasuk berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan pada indikator perubahan nyata, program keluarga harapan dapat mengatasi masalah kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat, namun kendalanya masih banyak masyarakat miskin yang belum terdaftar kedalam program ini dan juga program ini menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap bantuan yang diberikan sehingga masyarakat tidak ingin keluar dari rantai kemiskinan, kemudian keuntungan yang didapat dari program ini sangatlah banyak, seperti dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta juga mendapat bantuan komplementer.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam mengatasi kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Batu Bersurat, bahwasanya faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas Program Keluarga Harapan dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar adalah sebagai berikut :

1. Masih banyaknya masyarakat miskin yang belum terdaftar kedalam program keluarga harapan.

2. Masyarakat tidak memahami dengan jelas informasi yang disampaikan oleh pendamping PKH.
3. Kurang efektifnya media komunikasi yang digunakan untuk memberikan informasi mengenai kegiatan didalam pelaksanaan program keluarga harapan.
4. Masyarakat kurang memahami dengan jelas tentang program PKH, baik itu tentang persyaratan dan kewajiban penerima PKH, maupun kegunaan dari uang yang diberikan.
5. Jumlah pendamping PKH sedikit, seharusnya pendamping disediakan per desa agar kegiatan dapat berjalan dengan lancar.

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kelurahan Batu Bersurat Kecamatan XIII Koto Kampar peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan yang dilihat dari :

Pertama, pemahaman beberapa masyarakat terhadap program ini masih kurang baik, masyarakat kurang mengerti tentang bantuan ini karena tidak terdaftar kedalam program ataupun terdaftar kedalam program tetapi kurang memahami kegiatan didalam program ini. Tidak aktif didalam sosialisasi serta pelaksanaan sosialisasi program yang hanya dilaksanakan untuk keluarga penerima manfaat (KPM) PKH yang dilakukan per tiga bulan, yang mana seharusnya sosialisasi dilaksanakan per bulan. Kemudian bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) ini dapat diterima oleh semua masyarakat.

Kedua, mengenai tepat sasaran, pihak dinas sosial telah melaksanakan tugas dengan baik, karena menetapkan sasaran sesuai dengan data yang diberikan oleh kelurahan, tetapi fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak terjadi ketidaktepatan sasaran, seharusnya pihak dinas sosial turun kelapangan dan meninjau keluarga penerima manfaat program dengan teliti.

Ketiga, tentang ketepatan waktu, pihak pengurus program keluarga harapan sudah melakukan tugas sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan, dan pencairan dana PKH terealisasikan tepat waktu namun terkadang juga mengalami keterlambatan yang disebabkan oleh uang yang diberikan oleh pemerintah pusat belum masuk ke

rekening KPM dan juga karena kesalahan sistem serta informasi kurang diterima dengan baik oleh KPM dikarenakan hanya disampaikan melalui mulut ke mulut.

Keempat, tujuan program keluarga harapan untuk meningkatkan pendidikan serta memelihara kesehatan sudah sangat tercapai namun masih ada masyarakat yang menggunakan uang ini untuk hal yang bersifat tidak kebutuhannya, dan mengenai pengawasan dari pihak dinas sosial pengawasan sudah dilakukan tetapi jarang, pihak dinas sosial seharusnya lebih sering melakukan pengawasan agar masyarakat bisa menyampaikan langsung keluhan kesahnya atau masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini dan bisa mendapatkan titik terang ataupun solusi dari pihak dinas sosial tersebut dan juga seharusnya pihak pendamping melakukan pengawasan terhadap penggunaan uang yang diberikan kepada KPM agar kegunaan uang tersebut tidak melenceng dari yang seharusnya.

Kelima, bahwa program keluarga harapan dapat mengatasi masalah kemiskinan di Kelurahan Batu Bersurat, namun menyebabkan ketergantungan masyarakat terhadap program ini sehingga masyarakat itu sendiri tidak ingin keluar dari lingkup garis kemiskinan, kemudian keuntungan yang didapat dari program ini sangatlah banyak, seperti dengan mudah mengakses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta juga membantu untuk mendapatkan bantuan komplementer.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepada pihak Pemerintah Kelurahan Batu Bersurat dan Dinas Sosial agar dapat lebih teliti didalam menetapkan sasaran penerima Program Keluarga Harapan agar tujuan dilaksanakannya program ini dapat tercapai.
- b. Sebaiknya pihak Dinas Sosial menambah jumlah pendamping Program Keluarga Harapan agar kegiatan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan.
- c. Diharapkan kepada Pendamping PKH agar dapat menggunakan media komunikasi yang lebih efektif kepada keluarga penerima manfaat agar tidak terjadinya penyampaian informasi yang salah.
- d. Sebaiknya dilakukan evaluasi terhadap program keluarga harapan agar meningkatkan efektivitas dari program ini.
- e. Dalam pengambilan data yang dilakukan oleh pihak kelurahan seharusnya berkoordinasi dengan pihak RT RW agar tidak terjadi kesalahan atau ketidaktepatan sasaran dalam pengambilan data.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Agung, Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Pembaharuan.
- Chambers, Robert. 1983. *Pembangunan Desa Mulai dari Belakang*. Jakarta : LP3ES.
- Darwin, Muhadjir M. 2005. *Memanusikan Rakyat Penanggulangan Kemiskinan Sebagai Arus Utama Pembangunan*. Yogyakarta : Benang Merah.
- Hamid, Hendrawati. 2018. *Manajemen Pemberdayaan Masyarakat*. Makasar : De La Macca.
- Hasibuan, Malayu S.P, 2006, *Manajemen Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Edisi Revisi, Bumi Aksara : Jakarta.
- Islamy, M.Irfan. 2000. *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: BumiAksara.
- Jones. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Publik Policy) Terjemahan Ricky Ismanto*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Labolo, Muhadam.2014.*memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya*. Depok : RajaGrafindo Persada.
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung : PT Refika Aditama.
- Mardiasmo. 2016. *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta : Andy.
- Masruri. 2014. *Analisis Efektifitas Program Nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perkotaan*. Padang: Akademia Permata.

- Moleong, J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyawan, Rahman. 2016. *Masyarakat, Wilayah, dan Pembangunan*. Bandung : Unpad Press.
- Najiyati, et all. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor :Wetlands International.
- Rauf, Rahyunir. 2018. *Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dekonsentrasi, Desentralisasi, dan Tugas Pembantuan*. Pekanbaru : Zanafa.
- Soetomo. 2011. *Pemberdayaan Masyarakat (Mungkinkah Muncul Antitesisnya)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung :Refika Aditama.
- Sunartiningsih, Agnes, (2004), *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*: Yogyakarta : Aditya Media.
- Suparlan, Parsudi. 2004. *Kemiskinan di Perkotaan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Sutrisno. 2007. *Manajemen Keuangan : Teori, Konsep dan aplikasi*. Yogyakarta : Ekonisia.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung : Mandar Maju.

Syafiie, Inu Kencana. 2013. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik (pendelegasian tanggung jawab Negara kepada Presiden selaku Penyelenggara Pemerintahan)*. Jakarta Pusat : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama Pers.

Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.

Westra, Pariata., dkk. 1981. *Ensiklopedi Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.

B. Jurnal

Ekardo, Firdaus, & E. (2014). Efektifitas Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan di Nagari Lagan Hilir, Kab. Pesisir Selatan. *Jurnal Ilmu Sosial Mamangan*, 3(1), 1–9.

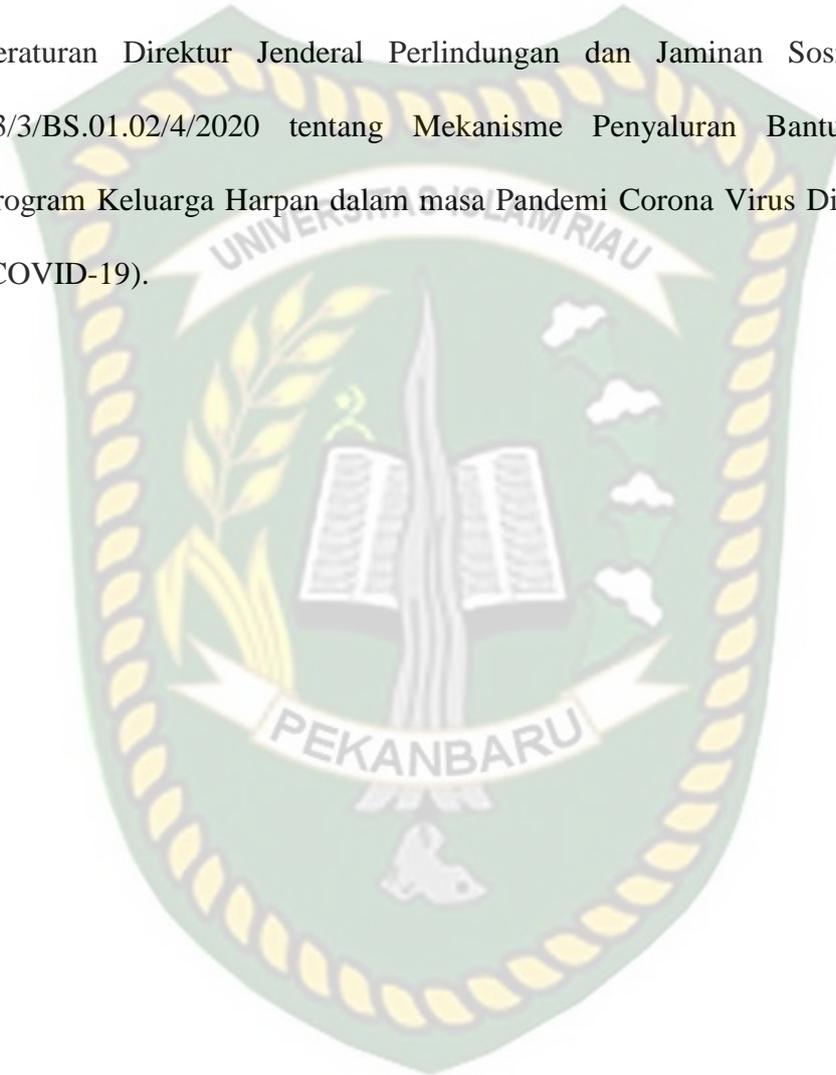
Rafiudin, M. (2016). Implementasi Program Keluarga Harapan Di Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak. *Focus*, 1(2), 49–80.

Rahmawati, E., & Kisworo, B. (2017). Peran Pendamping dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin melalui Program Keluarga Harapan. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 1(2), 161–169.

Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, Vol 11(January), 1–12.

C. Dokumentasi

1. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan.
3. Peraturan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 03/3/BS.01.02/4/2020 tentang Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan dalam masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau